

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Pengantar**

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan tujuan pembangunan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Implementasi dari Tujuan Pembangunan Nasional tersebut diwujudkan dalam berbagai program pembangunan selama 63 tahun sejak awal kemerdekaan. Pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut dihadapkan dengan berbagai tantangan, hambatan, ancaman dan masalah yang multidimensi; namun demikian Bangsa Indonesia terbukti berhasil memelihara dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejarah menunjukkan bahwa dua puluh tahun setelah kemerdekaan, Bangsa Indonesia telah berhasil menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang memberikan arah dan pedoman bagi pembangunan negara untuk mencapai cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tahapan pembangunan lima tahunan yang disusun dalam masa itu telah berhasil meletakkan dasar-dasar suatu proses pembangunan berkelanjutan dan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat dan terciptanya dalam berbagai indikator ekonomi dan sosial. Namun demikian keberhasilan yang diperoleh rentan terhadap pengaruh eksternal karena tidak didukung oleh kualitas institusi pelaksana yang memadai dan tidak mampu menjalankan fungsinya secara profesional.

Reformasi diseluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai jawaban atas krisis moneter yang berkembang menjadi krisis multidimensi pada tahun 1997 telah merubah paradigma pembangunan yang sebelumnya sentralisasi menjadi desentralisasi dan penguatan otonomi daerah. Namun demikian desentralisasi dan penguatan otonomi daerah berpotensi mengakibatkan perencanaan pembangunan tidak sinergis antara daerah yang satu dengan yang lainnya serta antara pembangunan daerah dan pembangunan secara nasional. Untuk itu disepakati agar ditetapkan Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang didalamnya diatur perencanaan jangka panjang (20 Tahun), jangka menengah (5 tahun) dan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang pada hakekatnya harus memperhatikan sinergitas pembangunan antar daerah ( kabupaten /kota dan provinsi) serta antara daerah dan pusat.

Untuk menjawab amanat sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Ende sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur harus merancang kembali strategi pembangunan jangka panjang dan tahapan lima tahunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang sesuai dengan asas dan referensi pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi yang tertuang dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, serta visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Nusa Tenggara Timur yang maju, mandiri, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Ende perlu terus mendayagunakan secara optimal semua potensi dan peluang pembangunan yang ada di wilayah kabupaten baik kekuatan yang ada pada institusi pemerintah, swasta, LSM dan masyarakat dan jejaring dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta lembaga-lembaga donor internasional melalui hubungan kerjasama yang erat dalam berbagai bidang pembangunan dan tetap menjaga jejaring dengan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha (*stakeholders pembangunan*) di Kabupaten Ende berkesadaran dan berpengharapan bahwa RPJPD Kabupaten Ende 2005-2025 merupakan pedoman dan semangat pelaksanaan tugas kemanusiaan melalui perencanaan pembangunan untuk menghasilkan perubahan yang progresif dan tidak kontra pembaharuan.

## **1.2. Pengertian**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ende yang merupakan substansi jabaran tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan RPJP Nasional serta RPJPD

Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jabaran dimaksud mencakup visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Ende untuk masa 2005-2025. Rentang waktu tersebut disesuaikan dengan Ketentuan Peralihan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ende sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 2005-2025 ditetapkan dengan maksud dan tujuan yaitu memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan di daerah (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu sama lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

### **1.4. Landasan Hukum**

RPJPD Kabupaten Ende disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan Idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sebagai landasan operasional dan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

1. TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

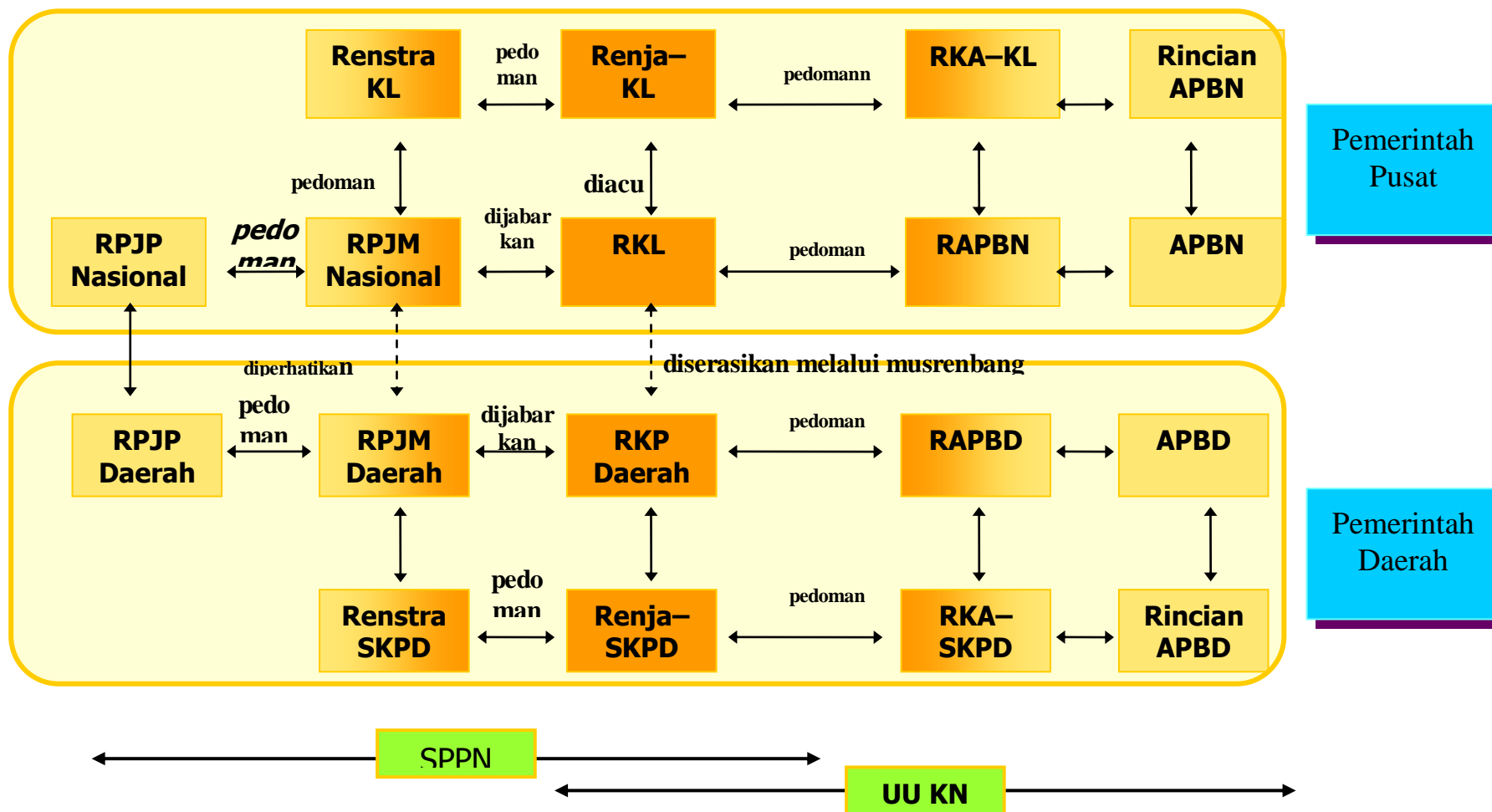
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Daerah Provinsi NTT 2004-2008;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006-2020;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/ 2020/ SJ Tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

#### **1.5. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ende dan merupakan bagian integral dari dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Rencana Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Untuk jelasnya hubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Gambar 1-1: Keterkaitan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah



Keterangan:

RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RKL	: Rencana Kementerian/Lembaga
RAPBN	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Renstra KL	: Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Renja KL	: Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
RKA-KL	: Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RAPBD	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Renstra SKPD	: Rencana Strategis Satuan Kerja dan Perangkat Daerah
Renja SKPD	: Rencana Kerja Satuan Kerja dan Perangkat Daerah
RKA-SKPD	: Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja dan Perangkat Daerah

## **1.6. Pendekatan dan Sistematika**

RPJPD Kabupaten Ende hasil dari pendekatan yang disebutkan diatas, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Gambaran Umum Daerah;

Bab III : Analisis Isu-isu Strategis

Bab IV : Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025;

Bab V : Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 ;

Bab VI : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

## BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH

Identifikasi kondisi dan karakteristik wilayah Kabupaten Ende meliputi, kondisi umum daerah, karakteristik fisik dan sumber daya alam, sosial kependudukan, perekonomian, prasarana dan sarana kota serta sistem transportasi.

### 2.1. Kondisi Saat Ini

#### 2.1.1. Letak Geografis

Secara geografis wilayah Kabupaten Ende terletak di bagian tengah Pulau Flores dengan batas :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores pada  $122^{\circ} 50' 41''$  BT dan  $8^{\circ} 54' 17''$  LS di Nangamboia atau  $122^{\circ} 50'$  BT dan  $8^{\circ} 54' 27''$  LS di Ngalu Ijukate (*Natural Border*).
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu pada  $121^{\circ} 24' 27''$  BT dan  $8^{\circ} 54' 17''$  LS di Nangamboia atau  $122^{\circ}$  BT dan  $8^{\circ} 54' 27''$  LS di Ngalu Ijukate (*Natural Border*).
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sikka dari pantai utara pada  $121^{\circ} 02'$  BT dan  $8^{\circ} 26' 04''$  LS di Nangambawe kearah tengah pada  $121^{\circ} 55' 44''$  BT dan  $8^{\circ} 43' 44''$  LS di Nangananuria kearah pantai selatan pada  $122^{\circ}$  BT dan  $8^{\circ} 54' 27''$  di Ngalu Ijukate (*Artificial Border*).
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Nagekeo dari pantai utara pada  $121^{\circ} 50'$  dan  $8^{\circ} 26' 04''$  LS di Nanganioniba kearah Utara pada  $121^{\circ} 26' 04''$  BT dan  $8^{\circ} 4' 17''$  LS di Sanggawangarowa kearah pantai selatan pada  $122^{\circ} 24' 27''$  BT dan  $8^{\circ} 54' 27''$  LS di Nangamboia (*Artificial Border*).

#### 2.1.2. Topografi

Pembagian wilayah menurut ketinggian terdiri atas 79,4% luas wilayah berada pada ketinggian kurang dari 500 meter diatas permukaan laut, dan 20,6% luas wilayah berada pada ketinggian lebih dari 500 meter diatas permukaan laut. Sementara itu, pembagian wilayah menurut kemiringan tanah adalah :

- 3,02% dari luas wilayah dengan kemiringan 0 - 3 %
- 5,85% dari luas wilayah dengan kemiringan 3 - 12 %
- 19,59% dari luas wilayah dengan kemiringan 12 - 40 %
- 71,54 % dari luas wilayah dengan kemiringan 40 %



Dibagian wilayah selatan daerah ini terletak pada jalur dalam deretan gunung api, diantaranya Gunung Api Iya mempunyai ketinggian 637 meter dengan letusan terakhir pada tahun 1969, dan Gunung Mutubusa mempunyai ketinggian 1.690 meter dengan letusan terakhir tahun 1938.

### **2.1.3. Geologi**

Pembagian wilayah menurut kedalaman tanah efektif, terbagi atas :

- a. 52 % kedalaman tanah efektif 0 - 30 cm
- b. 11,32 % kedalaman efektif 30 - 60 cm
- c. 30,22 % kedalaman efektif 60 - 90 cm
- d. 5,50 % kedalaman efektif 90 cm

Pembagian wilayah menurut tekstur tanah, terdiri dari :

- a. Tekstur tanah sedang 22,99 %
- b. Tekstur tanah kasar 57,11 %
- c. Tekstur tanah halus 3,70 %
- d. Tidak dikategorikan 16,90 %

### **2.1.4. Flora dan Fauna.**

#### **a. Flora**

Hampir sebagian wilayah Kabupaten Ende permukaan tanahnya gundul dan kritis sehingga hutan hanyalah 34,59 ha atau 15,52 %. Luas tanah gundul/kritis sampai dengan sekarang diperkirakan 70.724 hektar, yang secara sporadis hampir terdapat di seluruh wilayah ini. Sedangkan untuk berbagai jenis tanaman pangan seperti padi-padian, hortikultura dan komoditi perdagangan seperti kakao, jambu mete, kopi, cengkeh, kelapa, kemiri, asam, kayu manis, pinang, gewang, palem, bambu hutan, enau, cemara gunung, umbi-umbian dan rotan. Disamping itu ada pula tanaman anggrek, paku-pakuan serta tumbuhan obat tradisional yang relatif sedikit.

#### **b. Fauna**

Jenis fauna yang terdapat di daerah ini terdiri atas binatang liar meliputi rusa, babi hutan, buaya, biawak, jenis – jenis ular, landak, monyet, kucing hutan, kadal dan jenis satwa lumba-lumba, paus serta hiu dan berbagai ternak besar/ kecil seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi. Selain itu terdapat jenis satwa unggas meliputi burung beo, kakatua, nuri kecil, srigunting,

perkutut, tekukur, elang, kepondang, koka, nuri bodoh, burung gerugiwa, jenis blibis/pelican dan ikan-ikan hias.

### **2.1.5. Klimatologi**

#### **a. Curah Hujan**

Dari data curah hujan diperoleh bahwa jumlah curah hujan dan banyaknya curah hujan tahun ini relatif kecil dan bervariasi antara bulan yang satu dengan bulan lainnya. Jumlah curah hujan dan banyaknya hujan lebih besar pada bulan oktober – bulan april. Wilayah yang mendapat hari hujan dan banyaknya curah hujan lebih tinggi adalah wilayah timur seperti kecamatan Wolowaru dan Detusoko dengan jumlah curah hujan per tahun 1.068 mm dan jumlah hari hujan terbanyak di Kecamatan Wolowaru yaitu 114 hari.

#### **b. Cuaca**

Perubahan suhu harian tidak terlalu menonjol antara musim panas dan musim dingin. Rata – rata amplitudo suhu harian  $60^{\circ}$  dengan rata-rata suhu siang hari  $33,5^{\circ}\text{C}$  dan malam hari  $23^{\circ}\text{C}$ . Hal ini menunjukkan perbedaan suhu siang dan malam tidak terlalu besar. Ini berarti bahwa cuaca di wilayah daerah ini tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas.

## **2.2. Kependudukan, Angkatan Kerja dan Keluarga Berencana**

### **2.2.1. Jumlah Penduduk**

Berdasarkan sumber data dari BPS Kabupaten Ende, jumlah penduduk Kabupaten Ende dari tahun ke tahun meningkat yaitu sebesar 238.586 jiwa pada Tahun 2003, 243.407 jiwa pada Tahun 2004 dan 247.742 jiwa pada tahun 2005. Jumlah keluarga pra sejahtera sebanyak 28.121 KK dari seluruh 55.805 KK (50,39%) pada Tahun 2003, dan sebanyak 28.111 KK pra sejahtera dari seluruh 56.811 KK (49,48%) pada Tahun 2004. Dari survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2005, jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Ende Tahun 2005 sebanyak 29.229 rumah tangga atau 44,38% dari seluruh rumah tangga yang ada.

### **2.2.2. Kepadatan dan Distribusi Penduduk**

Pada tahun 2004, Kabupaten Ende terdiri atas 16 kecamatan dan 211 desa/ kelurahan. Jumlah kecamatan tersebut tidak berubah dari tahun 2003 namun

mengalami pemekaran desa yang terjadi di beberapa kecamatan. Ditinjau dari kepadatan dan distribusi penduduk di Kabupaten Ende masih belum merata. Sebagian besar penduduk masih terkonsentrasi di bagian selatan Kabupaten Ende. Mayoritas penduduk pada tahun 2004 terkonsentrasi pada Kecamatan Ende Selatan, Ende, Nangapanda, Wolowaru dan Lio Timur. Sementara distribusi penduduk terendah berada di Kecamatan Ndona Timur dengan jumlah penduduk 4.997 atau 0,03% dari total penduduk kabupaten pada Tahun 2004.

Kabupaten Ende yang memiliki luas wilayah sebesar 2.046,6 Km<sup>2</sup> dengan tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2004 sebesar 119 jiwa/km<sup>2</sup>. Angka kepadatan penduduk tersebut bervariasi pada setiap kecamatan. Selain itu kepadatan penduduk di Kabupaten Ende masih belum merata.

### **2.2.3. Komposisi Penduduk**

Pada Tahun 2004, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 114.528 jiwa sementara penduduk perempuan sebanyak 128.879 jiwa. Jumlah penduduk menurut umur menunjukkan bahwa jumlah terbesar penduduk berada pada golongan usia produktif (15 - 64 tahun) artinya penduduk yang masih memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaannya dan tidak bergantung kepada orang lain.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Ende pada tahun 2004 berada dalam kelompok umur 5-9 tahun yaitu sebesar 30.358 jiwa dan 10 – 14 tahun yaitu sebesar 27.874 jiwa. Sedangkan kelompok umur dengan jumlah terkecil adalah kelompok penduduk usia 70 - 74 tahun yaitu sebanyak 3.155 jiwa.

### **2.2.4. Laju Pertumbuhan Penduduk**

Meskipun jumlah penduduk Kabupaten Ende secara absolut mengalami kenaikan, namun laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Ende dari periode ke periode terus menunjukkan fluktuasi, yaitu dari 1,3% per tahun pada periode tahun 1971 – 1980 turun menjadi 0,3% per tahun 2000 – 2005. Sementara itu, tingkat kelahiran di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau *Total Fertility Rate* (TFR) menunjukkan fluktuasi sejak tahun 1979, yaitu dari 5,7 anak pada Tahun 1979 turun menjadi 3,6 anak pada tahun 1997. TFR untuk Kabupaten Ende hasil SDKI Tahun 2002 sebesar 3,01 anak. Ini berarti setiap ibu di Kabupaten Ende melahirkan 3 anak dalam satu keluarga.

### 2.2.5. Angkatan Kerja

Hasil Susenas 2004 menunjukkan bahwa di Kabupaten Ende, penduduk yang berumur 15 tahun ke atas berjumlah 185.457 jiwa dan 135.313 jiwa atau 72,96% penduduk masuk dalam angkatan kerja. Dari 135.313 jiwa yang masuk dalam angkatan kerja pada tahun 2004, yang melakukan aktivitas kerja sebanyak 129.616 jiwa atau 95,79%, sedangkan sisanya sebesar 4,21% masih dalam usaha mencari pekerjaan atau sering disebut pengangguran. Jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja tahun 2001 dan 2002, angkatan kerja tahun 2003 mengalami peningkatan seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2-1: Penduduk Berumur 15 tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja di Kab. Ende Th. 2001-2003**

No	Angkatan Kerja	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003
	Angkatan Kerja	107.295	130.494	135.313
1	Bekerja	103.865	123.719	129.610
2	Total Pengangguran	3.430	6.775	5.703

*Sumber: Ende dalam AngkaTh. 2004*

Sementara itu, dilihat dari lapangan usaha utama, angkatan kerja yang bekerja pada sektor primer (pertanian) pada tahun 2001, 2002 dan 2003 lebih banyak daripada yang bekerja di sektor sekunder (pertambangan dan penggalian, industri, listrik dan air minum, bangunan dan konstruksi) dan tersier (perdagangan, angkutan, keuangan dan jasa-jasa). Jumlah angkatan kerja yang bekerja di lapangan usaha primer tahun 2001 sebanyak 65.600 orang (63,15%), tahun 2002 sebanyak 79.317 orang (64,11%) dan tahun 2003 sebanyak 92.345 orang (71,24%).

### 2.2.6. Keluarga Berencana

#### a. Tingkat prevalensi peserta KB aktif

Tingkat partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif pada tahun 2004 sebanyak 21.129 atau 61,17% dari jumlah PUS sebanyak 34.543. Hal ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan peserta KB aktif pada Tahun 2002 yaitu sebanyak 219.765 atau 47,57% dari jumlah PUS

41.545, dan Tahun 2003 peserta KB aktif sebanyak 22.903 atau 52,51% dari jumlah PUS 43.618.

#### **b. Sumber Daya Program Keluarga Berencana**

Sumber daya program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera meliputi para petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), petugas PPKBD, dan Sub PPKBD yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan dan desa. Jumlah petugas KB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Sementara itu, berbagai kelompok peduli Keluarga Berencana juga tersebar di wilayah kecamatan dan desa antara lain kelompok Bina Keluarga Berencana (BKB), dan Bina Keluarga Remaja (BKR).

### **2.3. Sosial, Politik dan Keamanan**

#### **2.3.1. Kondisi Sosial**

Kondisi sosial di Kabupaten Ende ditandai dengan masih banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) antara lain penyandang cacat, dan wanita rawan sosial. Untuk jumlah penyandang cacat tahun 2004 sebanyak 2.517 orang yang termasuk dalam cacat tubuh sebanyak 1.226 orang, tuna netra 361 orang, tuna wicara 573 orang dan cacat mental 357 orang. Jumlah ini meningkat jika dibanding dengan jumlah penyandang cacat pada tahun 2002 sebanyak 2.453 orang. Sementara itu, jumlah wanita rawan sosial pada tahun 2002 berjumlah 2.761 orang, naik menjadi 3.821 orang pada tahun 2003 dan Tahun 2004.

Penanganan masalah sosial yang dilakukan salah satunya dengan pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dimana jumlah PSM aktif tahun 2002 sebanyak 1.345 orang, tahun 2003 sebanyak 169 orang dan tahun 2004 sebanyak 169 orang.

#### **2.3.2. Kondisi Politik dan Keamanan**

Kondisi politik di Kabupaten Ende salah satunya digambarkan melalui banyaknya partai politik di Kabupaten Ende. Jumlah partai politik di Kabupaten Ende yang mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2004 sebanyak 24 partai politik.

Sementara itu, kasus kejahatan/ pelanggaran yang dicatat terjadi di Kabupaten Ende selama Tahun 2004 yaitu pelanggaran terhadap ketertiban umum, kesusilaan, perjudian, penculikan, pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penggelapan, penipuan, dan merusak barang.

## 2.4. Pendidikan

Sektor pendidikan menjadi salah satu sektor penting dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Situasi pembangunan di Kabupaten Ende untuk sektor pendidikan dapat dilihat melalui indikator- indikator:

### a. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf penduduk Kabupaten Ende usia 15 tahun ke atas tahun 2004 dan 2005 sebesar 89,02%. Hal ini menunjukkan bahwa 10,98% penduduk usia >15 tahun masih buta huruf.

### b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK tingkat SD/MI Kabupaten Ende Tahun 2004 sebesar 126,61%, Ini menunjukkan bahwa jumlah siswa yang belajar di jenjang SD tidak saja pada usia 7 – 12 tahun tetapi terdapat siswa yang usianya > 12 namun masih duduk di jenjang SD. Hal ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang terlambat masuk jenjang SD.

Sementara itu, APK SMP/MTs Tahun 2004 yaitu 60,20%. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 39,80% penduduk kelompok usia 13-15 tahun tidak duduk di jenjang SMP. Untuk tingkat SMA/MA/SMK/MAK, APK Tahun 2004 sebesar 56,56%. Dari APK ini juga terlihat bahwa masih terdapat penduduk kelompok usia 16-18 tahun yang tidak duduk di jenjang SMA/MA/SMK/MAK.

Meskipun mengalami peningkatan pada setiap jenjang pendidikan, namun APK tingkat SD/MI jauh lebih lebih besar dibanding APK tingkat SMP/MTs dan APK paling rendah adalah APK tingkat SMA/MA/SMK/MAK untuk Tahun 2004.

### c. Angka Partisipasi Murni ( APM )

Seperti halnya pada gambaran Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2004 tingkat SD/MI jauh lebih lebih besar dibanding APM tingkat SMP/MTs dan APK paling rendah adalah APM tingkat SMA/MA/SMK/MAK.

Angka Partisipasi Murni SD/MI Tahun 2004 sebesar 87,95%, tingkat SMP/MTs, APM Tahun 2004 sebesar 44,88%, sementara APM SMA/MA/SMK/MAK sebesar 29,00%. Masih rendahnya APM untuk semua jenjang pendidikan ini menunjukkan bahwa belum semua anak usia sekolah menikmati pendidikan di sekolah.

#### d. Angka Kelulusan

Angka kelulusan tingkat SD/MI Tahun 2004 lebih tinggi dibanding angka kelulusan tingkat SMP/MTs, SMA/MA dan SMK pada periode tahun yang sama.

Angka kelulusan SD/MI Tahun 2004 sebesar 93,72%, angka kelulusan SMP/MTs Tahun 2004 sebesar 86,66%, angka kelulusan SMA/MA Tahun 2004 sebesar 82,19%, dan angka kelulusan SMK/MAK sebesar 99,46% pada Tahun 2004.

#### e. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APS) untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK Kabupaten Ende Tahun 2004-2005 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Table 2-2: Persentase APS SD/MI Kabupaten Ende Tahun 2004-2005**

Uraian	2004	2005
Jml murid SD/MI yang putus sekolah	368	370
Jml murid SD/MI	38.942	39.142
Persentase	0,94	0,95

Sumber: Dinas PPO Kab. Ende

**Tabel 2-3: Persentase APS SMP/MTs Kabupaten Ende Tahun 2004-2005**

Uraian	2004	2005
Jml murid usia SMP/MTs yang putus sekolah	260	262
Jml murid SMP/MTs	9.962	12.070
Persentase	2,61	2,17

Sumber: Dinas PPO Kab. Ende.

**Tabel 2-4: Persentase APS SMA/MA Kabupaten Ende Tahun 2004-2005**

Uraian	2004	2005
Jml murid SMA/MA yang putus sekolah	22	22
Jml murid SMA/MA	6.406	6.771
Persentase	0,34	0,32

Sumber: Dinas PPO Kab. Ende

**Tabel 2-5: Persentase APS SMK/MAK Kabupaten Ende Tahun 2004-2005**

Uraian	2004	2005
Jml murid SMK/MAK yang putus sekolah	41	41
Jml murid SMK/MAK	2.961	2.863
Persentase	1,38	1,43

Sumber: Dinas PPO Kab. Ende

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah peserta didik menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Sementara, angka putus sekolah lebih banyak terjadi untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMK/MAK dibanding angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMA/MA.

**f. Sumber Daya Tenaga Pendidik**

Guru memiliki peranan sangat penting dalam menentukan mutu dan kelangsungan proses belajar mengajar pada jenjang pendidikan mulai dari tingkatan SD, SLTP dan SLTA. Data jumlah guru dibanding dengan jumlah sekolah dan peserta didik untuk masing-masing jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2-6: Jumlah Sekolah, Guru dan Peserta Didik di Kabupaten Ende Tahun 2002-2004**

JENJANG PENDIDIKAN	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
<b>Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/ MI)</b>			
Jumlah Sekolah	339	336	334
Jumlah Guru	2222	2338	4451
Jumlah Peserta Didik	39.883	38.952	39.211
Rata-Rata Guru per Sekolah	6	6	13
Rasio guru per Peserta Didik	1:17.9	1:16.6	1:8.8
<b>Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs)</b>			
Jumlah Sekolah	58	58	60
Jumlah Guru	745	880	914
Jumlah Peserta Didik	11.825	11.894	12.596



JENJANG PENDIDIKAN	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
Rata-Rata Guru per Sekolah	1:12.8	1:15.2	1:15.2
Rasio guru per Peserta Didik	1:15.9	1:13.5	1:13.8
<b>Sekolah Menengah Umum (SMU)/ Madrasah Aliyah (MA)</b>			
Jumlah Sekolah	18	18	16
Jumlah Guru	416	912	415
Jumlah Peserta Didik	5775	6429	5503
Rata-Rata Guru per Sekolah	1:23.1	1:50.6	1:25.9
Rasio guru per Peserta Didik	1:13.9	1:7.0	1:13.3

*Sumber : Data Ende Dalam Angka Tahun 2002-2004*

Tabel diatas menunjukkan bahwa rasio guru terhadap jumlah sekolah untuk SD menunjukkan sedikit perbaikan dari tahun 2002-2004. Untuk jenjang pendidikan SLTP, rasio guru terhadap jumlah sekolah tetap pada tahun 2003 dan 2004, sementara peningkatan rasio guru terhadap jumlah sekolah yang cukup besar terjadi pada jenjang pendidikan SMA dan SMK di tahun 2003. Sementara itu, rasio guru terhadap jumlah peserta didik untuk semua jenjang pendidikan terlihat mengalami perbaikan meski tidak terlalu signifikan dari tahun 2002-2004.

#### **a) Prasarana Pendidikan**

Salah satu faktor pendukung terciptanya mutu pendidikan tentu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, Ditinjau dari jumlah sekolah yang ada, di Kabupaten Ende, jumlah sekolah swasta lebih banyak dibandingkan dengan sekolah negeri. Data jumlah sekolah negeri dan swasta dari setiap jenjang pendidikan tingkat SD, SLTP, SLTA pada tahun 2004 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2-7: Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Ende Tahun 2004**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	BANYAKNYA SEKOLAH		
		Jml	Negeri	Swasta
1	Sekolah Dasar (SD/MI)	334	169	165
2	Sekolah Menengah Pertama (SLTP/MTs)	60	21	39
3	Sekolah Menengah Atas (SMA/MA)	16	5	11
4	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK/MAK)	7	5	2

Sumber : Data Base Kab. Ende Tahun 2004

Sementara itu, jumlah Perguruan Tinggi di Kabupaten Ende sebanyak 4 buah dengan didukung oleh jumlah dosen yang cukup memadai yang menjadi potensi daerah dalam bidang pendidikan. Ke empat Perguruan Tinggi tersebut adalah Universitas Flores, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat (STPM), Sekolah Tinggi Ilmu Pastoral (STIPAR), dan Akademi Perawat Ende.

## 2.5. Kesehatan

Pembangunan kesehatan di Indonesia harus diakui secara bertahap telah mengalami peningkatan. Data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan angka kematian bayi menurun dari 46 (SDKI 1997) menjadi 35 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2002-2003) dan angka kematian ibu melahirkan menurun dari 334 (SDKI 1997) menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2002-2003). Umur harapan hidup meningkat dari 65,8 tahun (Susenas 1999) menjadi 66,2 tahun (Susenas 2003). Menurut survey konsumsi garam yodium yang juga mencakup survei status gizi, prevalensi gizi kurang (*underweight*) pada anak balita, telah menurun dari 34,4% (1999) menjadi 25,8% (2002).

Di tingkat provinsi, derajat kesehatan di Nusa Tenggara Timur juga telah mengalami peningkatan, hal itu ditandai dengan menurunnya angka kematian Bayi (AKB) dari 53/1000 (th 2002) menjadi 50/1000 (tahun 2005) dan angka kematian ibu melahirkan (AKI) dari 554/100.000 (tahun 2002) menjadi 540/100.000 (tahun 2005). Sementara, prevalensi gizi kurang menunjukkan angka 26%.

Di tingkat Kabupaten Ende, gambaran umum di sektor kesehatan dapat dilihat melalui indikator-indikator:

**a. Persentase balita dengan gizi buruk.**

Persentase balita dengan gizi buruk mengalami peningkatan dari 0,78% (188 balita dari 24.037 jumlah balita yang ditimbang) pada tahun 2004 menjadi 1,77% (291 balita dari 23.225 jumlah balita yang ditimbang) pada tahun 2005.

**b. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup**

Pada tahun 2004 angka kematian bayi sebesar 14 per 1.000 kelahiran hidup (78 jumlah bayi yang lahir meninggal dari 5.579 jumlah kelahiran hidup), pada tahun 2005 sebesar 6 per 1.000 kelahiran hidup (38 jumlah bayi yang lahir meninggal dari 5.695 jumlah kelahiran hidup).

**c. Kasus Kematian Ibu**

Kasus kematian ibu melahirkan pada tahun 2004 sebanyak 18 kasus dari 5.579 jumlah kelahiran hidup, Tahun 2005 sebanyak 10 kasus dari 5.696 jumlah kelahiran hidup. Meskipun bervariasi, namun kasus kematian ibu masih cukup tinggi dari tahun ke tahun.

Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup untuk Kabupaten tidak dapat diperhitungkan mengingat jumlah kelahiran hidup tidak mencapai 100.000. Namun demikian tren dapat dilihat dari angka kasus kematian yang terjadi.

**d. Angka pertolongan persalinan**

Angka pertolongan persalinan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi tahun 2004 sebesar 76% (4.321 jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi dari 5.659 jumlah persalinan). Tahun 2005 mencapai 84% (4.846 jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi dari 5.792 jumlah persalinan).

**e. Persentase Desa dan Kelurahan dengan Imunisasi pada bayi secara lengkap / *Universal Child Immunization (UCI)***

Persentase kelurahan yang memberikan imunisasi pada bayi secara lengkap *Universal Child Immunization (UCI)* pada tahun 2004 mencapai 63,5% (134 jumlah kelurahan/desa yang mencapai UCI dari 211 jumlah kelurahan/desa). Tahun 2005 mencapai 78% (165 jumlah kelurahan/ desa yang mencapai UCI dari 211 jumlah kelurahan/desa).

**f. Angka Kesembuhan Penderita TBC Paru BTA+**

Angka kesembuhan penderita TBC dengan TB BTA+ pada tahun 2004 mencapai 62% (26 jumlah penderita TBC dengan BTA+ yang sembuh dari 42 jumlah penderita TBC dengan TB BTA+ yang diobati). Tahun 2005 mencapai 52,6% (30 jumlah penderita TBC dengan TB BTA+ yang sembuh dari 57 jumlah penderita TBC dengan TB BTA+ yang diobati).

**g. Persentase Penanganan Kasus HIV**

Persentase Penanganan Kasus HIV pada tahun 2004 mencapai 0% (tidak ada kasus). Tahun 2005 mencapai 100% (5 jumlah kasus HIV yang ditangani dari 5 jumlah kasus HIV).

**h. Persentase Penanganan Kasus Malaria.**

Penyakit malaria ditemukan di semua kecamatan, namun demikian kasus tertinggi terjadi di Kecamatan Nangapanda dengan angka kasus baru malaria per tahun atau AMI (Annual Malariometrik Incidence) sebesar 400/100 penduduk dan ini tergolong sangat tinggi dibandingkan Indikator Indonesia sehat 2010 mensyaratkan AMI malaria 15/1000 penduduk. Secara kabupaten, Persentase penanganan kasus malaria selama tahun 2004 mencapai 100%, dimana pada Tahun 2004 sebanyak 1.529 kasus malaria ditangani.

**i. Rasio tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat) per jumlah penduduk.**

Jumlah tenaga dokter, bidan dan perawat di Kabupaten Ende tahun 2004-2008 digambarkan dalam grafik di bawah ini.

**Table 2-8: Data Tenaga Kesehatan (Dokter Umum, Perawat dan Bidan) di Kabupaten Ende Tahun 2004-2005.**

NO	Kecamatan	Tahun 2004	Tahun 2005
1	2	3	4
1	Dokter Umum	15	37
2	Perawat	105	110
3	Bidan	62	137
4	Lainnya	162	38
	Jumlah penduduk	243.407	247.742

*Sumber : Ende dalam Angka Tahun 2004, 2005.*

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah tenaga dokter, perawat dan bidan di Kabupaten Ende tahun 2004 dan 2005 mengalami peningkatan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka rasio tenaga dokter, perawat dan bidan per 10.000 penduduk masih rendah.

Rasio dokter dibanding 10.000 jumlah penduduk Tahun 2004, dan 2005, adalah 0,63/10.000; dan 1,48/10.000. Rasio perawat dibanding 10.000 penduduk Tahun 2004, dan 2005 adalah 4,37/10.000; dan 4,4/10.000. Sementara, rasio bidan dibanding 10.000 penduduk Tahun 2004, dan 2005, adalah 2,53/10.000; dan 5,40/10.000.

**j. Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk.**

Data sarana kesehatan menurut jenis fasilitas di Kabupaten Ende dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2-9: Data Sarana Kesehatan di Kabupaten Ende Tahun 2004-2005.**

NO	SARANA KESEHATAN	Tahun 2004	Tahun 2005
1	2	3	4
1	Rumah sakit	3	3
2	Puskesmas	20	20
3	Puskesmas Pembantu	48	56
4	Balai Pengobatan	5	8
5	Posyandu	503	503
6	Polindes	56	56
7	Apotik	2	4

*Sumber : Ende dalam Angka dan Bank data Dinkes Ende Tahun 2004, 2005.*

Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk tidak terlalu signifikan mengalami perbaikan dikarenakan pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya. Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk pada tahun 2004 mencapai 8,3/100.000 (20 jumlah puskesmas dari 243.047 jumlah penduduk). Tahun 2005 mencapai 8,3/100.000 (20 jumlah puskesmas dari 247.742 jumlah penduduk).

**k. Persentase penduduk miskin yang terjangkau dalam Jamkesmas.**

Penduduk miskin yang terjangkau dalam Jamkesmas Tahun 2004 sebanyak 55% (53.524 jumlah penduduk miskin yang tercakup Jamkesmas dari 96.948 jumlah

seluruh penduduk miskin). Tahun 2005 sebanyak 57% (88.663 jumlah penduduk miskin yang tercakup Jamkesmas dari 147.312 jumlah seluruh penduduk miskin).

#### I. Persentase rumah tangga yang memiliki jamban keluarga.

Jumlah rumah tangga yang memiliki jamban di Kabupaten Ende Tahun 2004 dan 2005 masih sekitar setengah dari seluruh rumah tangga yang ada. Peningkatan kepemilikan jamban dari tahun ke tahun tidak begitu besar. Pada tahun 2004 rumah tangga yang memiliki jamban baru mencapai 54,74% dan Tahun 2005 sebanyak 54,81%.

## 2.6. Kondisi Perekonomian

### 2.6.1. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kabupaten Ende tidak banyak berbeda jika dibandingkan dengan perekonomian Nusa Tenggara Timur, dimana peranan sektor-sektor primer khususnya sektor pertanian cukup menonjol disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa. Peranan ketiga sektor ini tidak tergeser dan komposisinya pun tidak mengalami perubahan berarti. Selengkapnya tentang perkembangan PDRB Kabupaten Ende Tahun 2003 dan 2005 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2-10: Perkembangan PDRB Per Sektor Lapangan Usaha Kabupaten Ende Tahun 2003 dan 2005**

NO	LAPANGAN USAHA	Th. 2003	Th. 2005
		(Rp) (000)	(Rp) (000)
1.	Pertanian	187.829.783	315.674.093
	a. Tanaman Bahan Makanan	80.805.961	129.030.574
	b. Tanaman Perkebunan	39.133.841	63.622.583
	c. Peternakan	34.892.015	56.697.486
	d. Kehutanan	3.639.247	1.867.572
	e. Perikanan	29.358.719	64.455.879
2.	Pertambangan dan Penggalian	10.916.668	13.849.440
3.	Industri Pengolahan	12.377.246	16.717.823
4.	Listrik dan Air Minum	3.921.546	3.473.722
	a. Listrik	2.095.654	2.317.125
	b. Air Minum	1.825.892	1.156.596
5.	Bangunan/Konstruksi	48.067.224	75.684.004
6.	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	144.588.149	212.762.168
	a. Perdagangan Besar & Eceran	142.355.928	209.883.099

NO	LAPANGAN USAHA	Th. 2003	Th. 2005
		(Rp) (000)	(Rp) (000)
	b. Hotel	1.658.279	715.615
	c. Restoran / Rumah Makan	573.942	2.163.454
7.	Pengangkutan & Komunikasi	40.557.702	52.661.546
	a. Pengangkutan	35.576.439	44.947.882
	1) Pengangkutan Jalan Raya	31.229.251	35.222.965
	2) Pengangkutan Laut	495.956	2.961.495
	3) Angkutan Sungai dan Danau	1.030.055	1.762.752
	4) Pengangkutan Udara	753.181	1.142.905
	5) Jasa Penunjang Angkutan	2.067.996	3.857.765
	b. Komunikasi (Telkom, Pos & Giro)	4.981.263	7.713.665
8.	Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	27.737.761	38.305.596
	a. B a n k	13.268.689	18.721.509
	b. Lembaga Keuangan Nir Bank	7.102.454	6.888.580
	c. Sewa Bangunan /Rumah	7.013.154	11.805.734
	d. Jasa Perusahaan	333.464	889.774
9.	J a s a - j a s a	119.659.738	180.288.206
	a. Pemerintahan Umum	112.734.664	128.029.757
	b. Swasta	6.925.074	52.258.449
	1) Sosial Kemasyarakatan	4.161.132	23.858.546
	2) Hiburan & Rekreasi	22.239	50.663
	3) Perorangan & Rumah tangga	2.741.703	28.349.240
	Produk Domestik Regional Bruto	595.655.814	909.419.599

*Sumber: Ende dalam Angka tahun 2004, 2005*

Dari data diatas terlihat bahwa sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Ende, dan dari tahun 2003 ke tahun 2005 mengalami peningkatan. Demikian halnya dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa-jasa perannya meningkat pada periode yang sama. Untuk sektor-sektor selain ketiga sektor tersebut perannya belum begitu menonjol, hal ini menggambarkan bahwa gejala perubahan struktur perekonomian di Kabupaten Ende karena perkembangan sektor pertanian, sektor jasa-jasa serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.

### 2.6.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pada umumnya hampir semua Kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur terkena dampak akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1998, termasuk Kabupaten Ende yang secara perlahan-lahan mulai membaik pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di Ende pada tahun 2005 mulai merangkak naik dengan tumbuh sebesar 5,02%. Dengan demikian jika diamati perkembangan dari masing-masing lapangan usaha, tampak bahwa

perekonomian di Ende telah mengalami pemulihan dari badai krisis pada tahun 1998. Sementara, sektor lain yang memiliki pertumbuhan cukup tinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pada tahun 2005 sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 4,64%.

### **2.6.3. PDRB dan Pendapatan Per Kapita**

Angka PDRB sebenarnya hanya menunjukkan besaran ekonomi secara keseluruhan untuk suatu wilayah dan tidak mampu mencerminkan tingkat perekonomian penduduknya. Suatu daerah dengan PDRB yang rendah mungkin saja rata-rata pendapatan penduduknya tinggi, jika jumlah penduduk di daerah tersebut juga rendah demikian juga sebaliknya di suatu daerah dengan PDRB tinggi dan jumlah penduduk banyak, rata-rata pendapatan penduduknya bisa saja sangat rendah. Berdasarkan kenyataan inilah maka dilakukan penghitungan angka-angka perkapita.

PDRB Kabupaten Ende atas dasar harga berlaku pada tahun 2005 adalah Rp. 909.419.599.000. Sumbangan terbesar dalam PDRB tahun 2005 berasal dari sektor pertanian, sedangkan sumbangan terendah dari sektor hiburan dan rekreasi. Sementara itu, angka pendapatan perkapita Kabupaten Ende lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2005 pendapatan perkapita di wilayah ini adalah sebesar 3,6 juta rupiah, sementara pendapatan perkapita Nusa Tenggara Timur adalah 3,2 juta rupiah pada tahun yang sama.

## **2.7. Pembangunan Sektor – Sektor Produksi**

Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat maka dilakukan upaya-upaya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dengan menggerakkan partisipasi aktif masyarakat melalui pola pemberdayaan dalam berbagai sektor pembangunan. Seiring dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat itu dilaksanakan pula berbagai kebijakan dengan maksud meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat sebagai salah satu prasyarat utama bagi masyarakat dalam rangka menggairahkan partisipasinya untuk turut mensukseskan pembangunan di segala bidang.

### **2.7.1. Pertanian**

Pembangunan bidang pertanian dapat diukur dari produksi hasil pertanian, pemanfaatan potensi lahan, serta kontribusi sektor pertanian terhadap PAD.



Produksi hasil pertanian di wilayah Kabupaten Ende dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2-11: Produktivitas Padi, Jagung, Ubi, Kacang dan Shorgum di Kab. Ende Tahun 2004-2005**

No	Jenis	Rincian	Tahun 2004	Tahun 2005
1	Padi Sawah	Luas tanam (ha)	4952	3897
		Luas panen (ha)	4690	3853
		Produktivitas (ton/ha)	3,975	3,19
		Produksi (ton)	18642	12306
2	Padi Ladang	Luas tanam (ha)	3562	3380
		Luas panen (ha)	2331	3361
		Produktivitas (ton/ha)	2,076	1,98
		Produksi (ton)	4840	6644
3	Jagung	Luas tanam (ha)	5987	4398
		Luas panen (ha)	3877	4925
		Produktivitas (ton/ha)	1,396	2,21
		Produksi (ton)	5413	10903
4	Ubi Kayu	Luas tanam (ha)	2933	2282
		Luas panen (ha)	2472	2509
		Produktivitas (ton/ha)	7,264	10,38
		Produksi (ton)	17957	26051
5	Ubi Jalar	Luas tanam (ha)	120	131
		Luas panen (ha)	143	142
		Produktivitas (ton/ha)	4,818	7,58
		Produksi (ton)	689	1077
6	Kacang Kedelai	Luas tanam (ha)	9	12
		Luas panen (ha)	7	7
		Produktivitas (ton/ha)	1,429	0,86

No	Jenis	Rincian	Tahun 2004	Tahun 2005
		Produksi (ton)	10	6
7	Kacang Tanah	Luas tanam (ha)	34	96
		Luas panen (ha)	37	91
		Produktivitas (ton/ha)	0,676	0,91
		Produksi (ton)	25	83
8	Kacang Hijau	Luas tanam (ha)	161	381
		Luas panen (ha)	141	360
		Produktivitas (ton/ha)	0,624	0,78
		Produksi (ton)	88	280
9	Shorgum	Luas tanam (ha)	25	14
		Luas panen (ha)	20	15
		Produktivitas (ton/ha)	0,550	1
		Produksi (ton)	11	15

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Ende

Dalam tabel terlihat bahwa produksi padi dan jagung cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Produksi hasil pertanian lainnya yaitu kacang-kacangan dan ubi berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Sementara itu, kontribusi PAD dari sektor pertanian mengalami penurunan dari tahun 2004 sebesar 1,07% atau Rp. 109.735.500 dari jumlah total PAD Rp. 10.243.101.500, dan tahun 2005 0,85% atau Rp. 103.350.000 dari jumlah total PAD Rp. 12.117.796.094.

### 2.7.2. Peternakan

Pembangunan sub sektor peternakan selama ini telah menunjukkan hasil yang cukup mengembirakan antara lain peningkatan populasi dan produksi ternak, konsumsi hasil – hasil ternak, penerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani ternak. Populasi ternak dari yang ada di Kabupaten Ende adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, babi dan unggas.

Ditinjau dari kontribusi terhadap PDRB, besarnya nilai tambah dan kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB Kabupaten Ende pada tahun 2005 sebesar 7,13%.

### 2.7.3. Kelautan dan Perikanan

Kondisi umum perairan di Kabupaten Ende terdiri dari :

- a. Pantai di wilayah Utara dan Selatan. Wilayah pantai utara sepanjang 60 mil atau 111.120 Km dan pantai selatan sepanjang 51 mil atau 94.452 Km.
- b. Potensi pantai untuk pengembangan budidaya mangrove untuk pantai utara ± 60% (36 mil atau 66,68 Km) sedangkan untuk pantai selatan adalah juga ± 60% (30,60 mil atau 56,68 Km).
- c. Luas perairan pantai adalah (4 mil)
- d. Luas perairan pantai utara adalah 823,2 Km<sup>2</sup>
- e. Luas perairan pantai selatan adalah 700 Km<sup>2</sup>
- f. Luas seluruh perairan seluas 1.523,20 Km<sup>2</sup>
  - Luas areal budidaya air payau 1.050 Ha, baru dikelola 12 Ha.
  - Luas areal untuk budidaya air tawar 2.242 Ha.
  - Potensi Mangrove (Hutan Bakau) di Kabupaten Ende:
  - Potensi lestari sumber daya ikan yang boleh ditangkap sebesar 19.299 ton/ tahun, yang terdiri dari:
    1. Perairan Utara Kab. Ende : 6.932 ton/tahun
    2. Perairan Selatan Kab. Ende : 12.367 ton/tahun
  - Potensi perairan untuk budidaya rumput laut: 363 ha, budidaya mutiara: 150 ha, budidaya ikan kerapu dan beronang: 150 ha.

Data produksi perikanan di Kabupaten Ende Tahun 2004 – 2005 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2-12: Data Produksi Perikanan Kabupaten Ende Tahun 2004 - 2005**

NO	TAHUN	PRODUKSI	
		IKAN LAUT (TON)	RUMPUT LAUT (TON)
1	2	3	4
1	2004	4.073.900	500
2	2005	4.750.137	540,6

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Ende

Data di atas menggambarkan produksi ikan dari tahun ke tahun meningkat, namun demikian yang menjadi tantangan bahwa di Kabupaten Ende hampir setiap hari masih mendatangkan ikan dari tiga kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur.

#### 2.7.4. Perkebunan.

Pembangunan sub sektor perkebunan di Kabupaten Ende mempunyai peranan yang cukup strategis karena agroklimat yang cukup mendukung dalam penyebaran komoditi perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Kontribusi sub sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Ende pada tahun 2005 sebesar Rp. 63.622.583,- atau 6,69% dari total PDRB.

Luas areal dan produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Ende yang menjadi produk unggulan di daerah, mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif sebagai berikut.

##### a. Luas Areal Jenis Komoditi

Luas areal komoditi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Ende keadaan Tahun 2005 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2-13: Luas Areal Tanaman Komoditi Perkebunan Tahun 2005**

No	JENIS KOMODITI	LUAS AREAL/ TAHUN
		2005
1	Kelapa	10.856,9
2	Jambu Mete	7.306
3	Kemiri	8.179
4	Kakao	5.297
5	Kopi	8.624
6	Cengkeh	1.169
7	Pinang	1.180
8	Kapuk	223,1
9	Vanili	157,3
10	Pala	28
11	Marica	39

Sumber : Ende Dalam Angka Kab. Ende

##### b. Produksi Tanaman Perkebunan

Masyarakat Kabupaten Ende terutama petani sebagian besar taraf hidupnya bergantung pada potensi perkebunan. Produksi komoditi perkebunan setiap tahun berfluktuatif seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2-14: Produksi Komoditi Perkebunan Tahun 2005.**

No	JENIS KOMODITI	PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN/ TAHUN (TON)
		2005
1	Kelapa	8.396
2	Jambu Mete	2.045
3	Kemiri	5.615
4	Kakao	2.141
5	Kopi	2.110
6	Gengkeh	481
7	Pinang	341
8	Kapuk	71
9	Vanili	40
10	Pala	6
11	Marica	8

*Sumber : Ende Dalam Angka Kab. Ende 2005.*

Dari potensi wilayah untuk lahan kering seluas 44.884 Ha, yang sudah dikembangkan seluas 28.719 Ha sedangkan yang belum dikembangkan seluas 16.165 Ha. Rencana pengembangan adalah :

- Tanaman Kopi Arabika (Andung Sari I): 8.974 Ha
- Tanaman Kakao : 1.000 Ha
- Tanaman Kelapa : 1.000 Ha
- Tanaman Vanili : 500 Ha
- Tanaman Pala : 372 Ha
- Tanaman Marica : 569 Ha

Pengembangan tanaman perkebunan masih sangat dibutuhkan sesuai dengan potensi lahan yang tersedia, namun yang perlu diprioritaskan pelaksanaannya adalah pada pembukaan lahan baru yang masih kosong seluas 500 Ha. Sesuai rencana akan dikembangkan dengan :

- Tanaman Jambu Mete : 100 Ha
- Tanaman Kakao : 200 Ha
- Tanaman Kopi Andung Sari I : 100 Ha
- Tanaman Kelapa Dalam : 100 Ha

Upaya peningkatan terus dilakukan untuk memenuhi pasar lokal, nasional maupun internasional. Secara teknis peningkatan produksi dapat dilakukan melalui kegiatan pengembangan untuk meningkatkan produksi persatuan luas dengan

memanfaatkan potensi lahan yang masih tersedia. Pengembangan tidak sebatas untuk meningkatkan produksi, tetapi juga meningkatkan kelestarian lingkungan, sehingga tata air lebih baik sekaligus mencegah erosi.

#### **2.7.5. Kehutanan**

Kontribusi sub sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Ende sangat kecil yaitu Tahun 2005 sebesar 0,36%. Fungsi Hutan berdasarkan Hasil Pemaduserasian Tata Guna Hutan Kesepakatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 1996 seluas 74.317,54 Ha :

1. Kawasan Lindung seluas 31.610,52 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung 24.193,72 Ha, Cagar Alam 2.060,30 Ha, dan Taman Nasional 5.356,50 Ha. Sedangkan areal hutan untuk Suaka Margasatwa, Taman Buru, dan Taman Wisata belum diproyeksikan.
2. Kawasan Budidaya seluas 42.707,02 Ha yang terdiri dari :
  - a. Hutan Produksi : 36.557,02 Ha
  - b. Hutan Produksi Terbatas : 2.275,00 Ha
  - c. Hutan Produksi yang Dikonversi (HPK) : 3.875,00 Ha
3. Kondisi Hutan Lebat: 58%, sedangkan sisanya seluas 42% adalah Lahan Kritis (Hutan Rawang, Semak Belukar dan Tanah Kosong)

#### **2.7.6. Pariwisata**

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Ende pada tahun 2004 sebanyak 8.250 orang yang terdiri dari 5.990 wisatawan nusantara dan 2.260 wisatawan manca negara. Namun pada tahun 2005 mengalami penurunan sebanyak 836 orang, sehingga menjadi 7.414 orang.

Kontribusi sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2004 sebesar Rp. 45.028.300, sementara tahun 2005 sebesar Rp. 77.120.400. Pendapatan dari sektor pariwisata bersumber dari pendapatan riil yang dipungut Dinas Pariwisata Kabupaten Ende dari beberapa sumber pendapatan baik yang dikelola langsung Dinas Pariwisata (seperti Sa'O Ria Wisata Bungalow Moni, Kolam Air panas Oka Detusoko, dan Pantai Bahari Ende) maupun tak langsung berupa sewa tempat/tanah dan sewa fasilitas (Sewa tanah di lokasi Restaurant Kelimutu Moni, sewa tempat/Cafe Mahakam, sewa gerobak).

Dari sisi potensi kepariwisataan, Kabupaten Ende kaya akan potensi pariwisata yaitu Obyek Wisata Alam, Wisata Budaya, dan Wisata Bahari. Obyek wisata tersebut umumnya belum dikembangkan dan bersifat lokal. Obyek yang sudah dikembangkan yaitu: Danau Kelimutu yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Kelimutu. Obyek wisata ini merupakan kebanggaan daerah ini karena merupakan salah satu keajaiban dunia.

## 2.7.7. Industri dan Perdagangan

### 2.7.7.1. Sektor Industri

Industri di Kabupaten Ende terdiri dari industri kerajinan rumah tangga dan industri kecil.

#### a. Industri Kerajinan Rumah Tangga.

Industri Kerajinan Rumah Tangga merupakan salah satu sektor pendukung perekonomian di Kabupaten Ende. Industri ini dari tahun ke tahun meningkat baik dari jumlah perusahaan maupun tenaga kerjanya. Data Industri Kerajinan Rumah Tangga dan Tenaga kerjanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2-15: Data Industri Kerajinan Rumah Tangga di Kabupaten Ende Tahun 2004-2005**

NO	TAHUN	INDUSTRI KERAJINAN RUMAH TANGGA / UNIT	TENAGA KERJA (ORANG)
1	2	3	4
1	2004	5.247	10.494
2	2005	5.258	10.516

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Ende

#### b. Industri Kecil

Industri kecil di Kabupaten Ende mengalami perkembangan pada tahun 2004 dan 2005. Data Industri Kecil per jenis kerajinan di Kabupaten Ende perkembangannya bervariasi dari tahun ke tahun. Untuk dapat mengetahui gambaran umum industri kecil dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2-16: Data Industri Kecil per Jenis Kerajinannya di Kabupaten Ende Tahun 2004 – 2005**

NO	JENIS INDUSTRI	INDUSTRI KECIL PER JENIS KERAJINAN	
		2004	2005
1	2	3	4
1	Industri Kayu	13	13
2	Industri Logam	26	26
3	Anyaman/Gerabah	2	3
4	Industri Kain Tenun	9.564	9.604
5	Industri Makanan	20	24
5	Dan Lainnya	121	121

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Ende

Peran sektor perindustrian Kabupaten Ende digambarkan melalui kontribusi sektor industri terhadap PDRB, produktivitas sektor industri, investasi sektor industri serta nilai investasi penanaman modal tiap tahun. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB pada tahun 2004 sebesar Rp. 13,4 milyar dari total PDRB Rp. 757,1 milyar atau sebesar 1,77 %. Untuk tahun 2005 kontribusi PDRB sektor industri sebesar Rp. 14,8 milyar dari total PDRB Rp. 824,9 milyar atau sebesar 1,79%.

Produktivitas sektor industri pada Tahun 2004, sebesar Rp. 104.650,814 angka ini diperoleh dari total sektor industri Rp.1.337.856.000 dibandingkan dengan jumlah total tenaga kerja industri 12.784, pada Tahun 2005 Rp. 1.562.855 dibandingkan dengan total tenaga kerja industri 12.745 sebesar Rp. 122.624.951.

Sementara itu, persentase investasi sektor industri pada tahun 2004 diukur berdasarkan jumlah investasi sektor industri tahun yang bersangkutan sebesar Rp. 23.075.000.000 dibandingkan dengan total investasi Rp. 23.075.000.000 adalah 100%. Sedangkan pada tahun 2005 investasi sektor industri dan perdagangan adalah 0% atau tidak terjadi investasi/penanaman modal pada sektor industri dan perdagangan.

#### 2.7.7.2. Sektor Perdagangan

Situasi sektor perdagangan di Kabupaten Ende digambarkan melalui produktivitas sektor perdagangan dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Produktivitas sektor perdagangan pada Tahun 2004,



sebesar Rp. 55.016.030.000 dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja sektor perdagangan 3.450 atau sebesar Rp. 24.827.145. Pada Tahun 2005, Rp. 85.653.650.000 dibandingkan dengan 3.450 atau Rp. 24.827.145. Sementara itu, pada tahun 2004 kontribusi PDRB sektor perdagangan berada pada level 22,86%. Hal itu menunjukkan bahwa peran sektor perdagangan dalam peningkatan perekonomian daerah cukup positif.

Kontribusi sektor perdangan di Kabupaten Ende salah satunya diperoleh dari perdagangan antar pulau terutama perdagangan komoditi unggulan seperti kopra, kakao, kemiri, cengkeh dan barang lainnya seperti batu warna penggajawa yang memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah. Produktivitas perdagangan yang berpengaruh pada kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah sangat ditunjang oleh keberadaan sarana perdagangan toko, kios, pasar dan perusahaan-perusahaan).

#### **2.7.8. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Kondisi riil perkembangan koperasi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah koperasi yang aktif dan berkualitas dari tahun ke tahun seiring dengan penambahan jumlah koperasi baru. Koperasi aktif pada tahun 2004 berjumlah 44 atau 83,02% dari 53 koperasi yang ada, tahun 2005 berjumlah 48 atau 82,76% dari 58 koperasi yang ada.

Persentase UMKM yang dibina juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. UMKM yang dibina pada tahun 2004 berjumlah 86 atau 2,69% dari 3.200 UMKM yang ada, tahun 2005 berjumlah 120 atau 3,33% dari 3.600 UMKM yang ada.

#### **2.7.9. Pertambangan dan Energi**

Potensi pertambangan di Kabupaten Ende khusus galian terdiri atas golongan A, golongan B maupun golongan C. Galian golongan A seperti emas masih terus dilakukan kegiatan penelitian, sedangkan potensi bahan galian golongan B seperti batu besi dan pasir besi terdapat di wilayah pemukiman penduduk sehingga sangat rentan terhadap musibah bencana alam seperti tanah longsor dan pasang naik air laut. Khusus pertambangan galian golongan C, merupakan potensi yang terus

dikelola dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pendapatan masyarakat, kebutuhan pembangunan fisik dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ada 5 jenis bahan galian golongan C yang menjadi unggulan di Kabupaten Ende antara lain :

- Batu hijau (Zeolit), terdapat disepanjang pantai Desa Penggajawa, Ndorurea dan Ondorea serta Batu hijau bongkahan yang terdapat di Dusun Puukungu Desa Ondorea barat.
- Granit, terdapat di wilayah Kecamatan Wolowaru, Wolojita dan Lio Timur
- Toseki, terdapat di wilayah Kecamatan Wewaria dan Maurole.
- Felspar, terdapat di wilayah Kecamatan Wolowaru, Lio Timur dan Wolojita.
- Tras, terdapat di wilayah Kecamatan Detusoko dan Lio Timur

Selain potensi pertambangan juga terdapat beberapa potensi energi lainnya seperti potensi energi panas bumi, potensi energi mikro hidro, dan potensi energi bayu dan energi matahari.

## **2.8. Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Daerah**

### **2.8.1. Transportasi Laut**

Prasarana transportasi laut berupa dermaga pelabuhan di Kabupaten Ende terdiri dari:

1. Pelabuhan Ende (Pelabuhan Umum) yang dibangun Tahun 1986 dengan panjang 100 m, lebar 8 m, dan trestle 100 m x 6 m
2. Pelabuhan Ippi (Pelabuhan Umum) dibangun Tahun 1982 dengan panjang 120m, lebar 35 m, terminal barang 425m, terminal penumpukan 15m, lapangan parkir 1.100m, dan trestle 150m x 12m,
3. Pelabuhan penyeberangan ferry Nangakeo (pelabuhan khusus) dibangun tahun 2004.

Arus barang bongkar muat di Pelabuhan Ippi berfluktuasi selama tahun 2002 sampai dengan 2004. Demikian pula banyaknya kunjungan kapal dan arus penumpang pada periode tahun yang sama bervariasi. Selengkapnya arus bongkar muat barang, penumpang dan kunjungan kapal di Pelabuhan Ippi seperti disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2-17: Data Arus Bongkar Muat dan Kunjungan Kapal Di Pelabuhan Ippi Kab. Ende Tahun 2002 – 2004.**

No	Rincian	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
1	Arus Barang Bongkar Muat			
	Bongkar	180.227	177.134	213.894
	Muat	73.645	63.375	69.151
2	Arus Penumpang			
	Penumpang turun	46.185	52.409	28.998
	Penumpang naik	35.956	33.954	46.081
4	Kapal	569	584	520

Sumber: Ende Dalam Angka 2004

### 2.8.2. Perhubungan Udara

Pelabuhan udara yang berada di Kabupaten Ende adalah pelabuhan udara domestik H. Hasan Aroebusman. Pelabuhan ini melayani arus penumpang, barang (bagasi), barang (cargo), dan barang (Posindo).

Frekuensi penerbangan di bandara H.H. Aroebusman tahun 2002 sebanyak 302 kali, tahun 2003 sebanyak 560 kali, dan tahun 2004 sebanyak 785 kali. Sementara jumlah arus penumpang yang datang dan berangkat seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2-18: Data arus Penumpang di Bandara H.H Aroebusman Ende Tahun 2002-2004**

No	Rincian	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
1	Arus penumpang datang	2.821 orang	8.282 orang	18.079 orang
2	Arus penumpang berangkat	3.469 orang	8.798 orang	14.923 orang

Sumber: Ende Dalam Angka 2004

### 2.8.3. Transportasi Darat dan Prasarana Jalan dan Jembatan

Transportasi darat di Kabupaten Ende dilayani oleh angkutan kota, angkutan pedesaan, dan angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP). Jumlah angkutan selama tahun 2001 s/d 2002 berfluktuasi yaitu 366 buah pada Tahun 2001, 353 buah pada Tahun 2002 dan 373 buah pada Tahun 2003

Sementara itu, prasarana jalan dan jembatan merupakan prasarana angkutan darat yang penting guna memperlancar kegiatan perekonomian. Panjang dan kondisi jalan di Kabupaten Ende dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Panjang jalan kabupaten yang kondisinya baik.

Tahun 2004, dari seluruh panjang jalan kabupaten 1.133 km, sepanjang 228,65 km jalan kabupaten (20,18%) dalam keadaan baik. Tahun 2005 mengalami perkembangan, dimana persentase kondisi jalan yang baik meningkat menjadi 25,79% tahun 2005

b. Jalan Menurut Status

Panjang jalan menurut status ada empat yaitu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan poros desa. Pada tahun 2004 telah memiliki jalan sepanjang 1.461,41 km dengan rincian 130,30 km adalah jalan negara, 160,30 km adalah jalan provinsi, 814,16 km adalah jalan kabupaten dan 356,55 km jalan poros desa. Panjang jalan ini tidak mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2002 dan 2003.

c. Jalan Menurut Jenis Permukaan.

Status jalan menurut jenis permukaan yaitu jalan beraspal, jalan berkerikil dan jalan tanah. Jalan tanah merupakan jalan yang terpanjang pada Tahun 2003 dan 2004 yaitu 350,22 km dibanding jenis permukaan aspal yaitu 306,30 km dan jalan berkerikil yaitu 157,64 km. Pada Tahun 2002, jalan dengan permukaan tanah sepanjang 739,75 km, sementara jalan permukaan kerikil 46,85 km. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jenis permukaan jalan dari tanah menjadi kerikil. Sedangkan jalan panjang jalan aspal menurun jika dibanding panjang jalan aspal pada Tahun 2002 yaitu 358,93 km.

d. Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik

Jembatan yang kondisinya baik Tahun 2004 adalah 38,10% atau 24 dari 63 jembatan yang ada. Pada tahun 2005 sebanyak, 41,27% atau 26 dari 63 jembatan yang ada.

#### **2.8.4. Prasarana Irigasi**

Luas areal perencanaan jaringan irigasi dari aspek luas potensial pertanian sebesar 13.841 hektar. Sementara luas lahan yang sudah terjangkau jaringan irigasi

sebesar 5.963 hektar. Selain jaringan irigasi juga terdapat bangunan utama berupa bendung, *free intake* sebanyak 51 unit dari 119 unit yang direncanakan. Prasarana irigasi lainnya berupa embung kecil sebanyak 24 buah dan yang masih berfungsi 9 buah.

#### **2.8.5. Penataan Ruang**

Penataan ruang ditujukan untuk menyeimbangkan pemanfaatan ruang bagi kepentingan manusia dengan memerhatikan keharmonisan, keterpaduan, keserasian dan perlindungan fungsi ruang untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu pembangunan tidak boleh memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, Wilayah administratif, Kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk mempermudah sistim perencanaan dan pemanfaatan tata ruang

#### **2.8.6. Perumahan**

Pemerintah Kabupaten Ende menyadari tingkat kelayakan perumahan masih jauh dari yang di harapkan. Salah satu kriteria yang dipakai untuk menentukan kelayakan adalah kriteria rumah sehat yang memberi perhatian pada kelayakan rumah ditinjau dari sisi kesehatan (misalnya kriteria ada tidaknya ventilasi udara, jenis lantai, jamban, serta luas ruangan dalam rumah dibanding jumlah anggota keluarga).

Data menunjukkan bahwa jumlah rumah yang masuk kriteria sehat selama tahun 2004 dan 2005 masih relatif rendah. Dari seluruh jumlah rumah baik di perkotaan maupun di kecamatan dan desa di wilayah kabupaten yang diperiksa pada tahun 2004, baru sebanyak 59,72% termasuk dalam kategori rumah sehat. Tahun 2005 jumlah rumah sehat 46,69% dari 32.684 rumah yang diperiksa.

Dilihat dari perkembangannya, maka terlihat meskipun belum semua rumah diperiksa namun dari tahun ke tahun meningkat jumlahnya, sementara untuk kriteria rumah sehat, persentase rumah yang dikategorikan sebagai rumah sehat relatif tidak banyak berubah dari tahun ke tahun.

Sementara itu, dari indikator ketersediaan air bersih di rumah tangga tercatat bahwa jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih pada Tahun 2004 yaitu 45.268, sementara tahun 2005 sebanyak 45.338 rumah tangga. Peningkatan ini diikuti juga dengan peningkatan jumlah rumah tangga di kabupaten tahun 2004 yaitu, 58.507, dan 58.593 pada tahun 2005. Dengan demikian presentase jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih dari jumlah seluruh rumah tangga Tahun 2004 sebesar 77,37%, dan tahun 2005 sebesar 77,38%,

## **2.9. Pemberdayaan Masyarakat**

Fokus pemberdayaan masyarakat meliputi 4 (empat) aspek utama yakni pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi difokuskan pada peningkatan kualitas sosial ekonomi masyarakat. Sedangkan di bidang sosial budaya ditekankan pada aspek apresiasi masyarakat sistem nilai sosial budaya yang didalamnya juga terkandung peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, pemberdayaan perempuan. Sedangkan dalam bidang politik difokuskan dalam penguatan pemahaman masyarakat tentang hakekat demokrasi sehingga masyarakat berpartisipasi aktif dalam seluruh proses pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dibidang lingkungan difokuskan pada pemanfaatan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

## **2.10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

### **2.10.1. Pemberdayaan Perempuan**

Pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan di Kabupaten Ende dapat dilihat diantaranya dari jumlah wanita yang melek huruf. Sementara itu, jumlah wanita usia produktif yang melek huruf cukup baik, yaitu tahun 2004 sebesar 90,93%, dan tahun 2005 sebanyak 91,01%.

### **2.10.2. Perlindungan Anak**

Perlindungan anak seringkali masih kurang mendapat perhatian dalam upaya pembangunan, sementara tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak merupakan generasi penerus keluarga dan bangsa yang perlu dipersiapkan menjadi lebih berkualitas. Masih banyaknya jumlah anak terlantar menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak belum dilaksanakan secara optimal. Jumlah anak terlantar di

Kabupaten Ende selama tahun 2002-2004 sangat fluktuatif, dimana jumlah anak terlantar Tahun 2002 berjumlah 3.055 anak, Tahun 2003 dan 2004 meningkat menjadi 3.803 anak.

### **2.11. Penanggulangan Bencana**

Dengan karakteristik alamnya, Kabupaten Ende merupakan salah satu kabupaten yang rawan terjadi bencana alam seperti gelombang pasang, banjir, tanah longsor, debris flow, gempa bumi dan letusan gunung berapi serta abrasi pantai. Beberapa kejadian bencana pernah dialami oleh masyarakat Kabupaten Ende seperti kejadian pada tahun 1992, Kabupaten Ende pernah diguncang gempa yang cukup besar dan menewaskan banyak penduduk. Demikian pula, bencana banjir yang menelan banyaka korban juga pernah terjadi pada tahun 2002. Meskipun demikian, upaya penanggulangan bencana yang selama ini dilakukan belum optimal terutama dalam upaya pengurangan risiko terjadinya bencana.

## **BAB III. ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS**

### **3.1. Ekonomi**

Krisis ekonomi tahun 1997/1998 telah memberikan pelajaran yang sangat mahal namun berharga bagi bangsa Indonesia. Krisis telah memaksa Indonesia melakukan perubahan yang perlu dilakukan dalam rangka koreksi kelemahan dan kesalahan masa lalu. Ekonomi, politik, sosial dan hukum mengalami transformasi dan reformasi menuju suatu sistem baru yang diharapkan akan lebih berkeadilan, handal dan berkelanjutan.

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Indonesia ke depan adalah sebagai berikut: rendahnya pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia Indonesia rendah, kurang menyatunya kegiatan perlindungan lingkungan hidup dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sehingga sering melahirkan konflik kepentingan antara ekonomi sumber daya alam (pertambangan, kehutanan) dengan lingkungan, kesenjangan pembangunan antar daerah masih lebar, seperti antara Jawa – luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) – Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta kota – desa, kualitas pelayanan infrastruktur yang belum sepenuhnya pulih dan masih tertundanya pembangunan infrastruktur baru, serta masih adanya potensi aksi separatisme dan konflik horizontal.

Rapuhnya perekonomian di negara Indonesia akibat krisis ekonomi menunjukkan bahwa pondasi ekonomi belum kuat menahan gejolak eksternal. Pertumbuhan yang cukup tinggi yang berhasil dipertahankan cukup lama lebih banyak didorong oleh peningkatan akumulasi modal, tenaga kerja dan pengurusan sumber daya alam dari pada peningkatan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan. Dari Krisis tersebut terungkap masalah mendasar bahwa kemajuan selama ini belum diikuti peningkatan efisiensi dan perbaikan tata kelola kelembagaan ekonomi yang akhirnya meruntuhkan kepercayaan pelaku baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu disamping rentan terhadap gangguan eksternal struktur perekonomian seperti itu, akan sulit berkembang jika dihadapkan pada kondisi persaingan yang lebih ketat baik pada pemasaran hasil produksi maupun pada peningkatan investasi, dalam era perekonomian dunia yang makin terbuka.



Dinamika perekonomian di Nusa Tenggara Timur tidak dapat dilepaskan dari dinamika perekonomian Indonesia dan perekonomian dunia di mana transaksi-transaksi ekonomi telah menjadi tanpa batas. Falsafah Indonesia yang bebas aktif dalam pergaulan dunia, serta pergeseran tata pemerintahan Indonesia kepada kondisi yang lebih demokratis telah memungkinkan Indonesia menjadi negara yang makin terbuka dalam melakukan transaksi ekonomi.

Pola pertumbuhan ekonomi setelah melewati masa krisis pada tahun 1998 masing – masing kecamatan di Kabupaten Ende pada umumnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup positif, kecuali kecamatan Ende Selatan, Ende dan Ndonga. Untuk 3 kecamatan tersebut negatif karena ada pemekaran wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ende secara keseluruhan pada tahun 2005 mencapai 5,02 % dan mengalami peningkatan pada tahun 2007 sebesar 5,26 %. Meskipun pola pertumbuhan ekonomi untuk Kabupaten Ende cukup positif, tetapi masih tetap lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional

Struktur perekonomian Kabupaten Ende dalam kurun 2005 – 2007 tidak banyak mengalami perubahan. Sektor ekonomi yang dominan dalam perekonomian Kabupaten Ende adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa. Sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Ende, namun angka pertumbuhannya dari tahun ke tahun relatif kecil. Lain halnya dengan sektor perdagangan hotel dan restoran besar peranannya namun berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan gejala perubahan struktur perekonomian di Kabupaten Ende, dimana perkembangan sektor jasa-jasa lebih baik dari sektor perdangan, hotel, dan restoran.

Lebih dari 60% total penduduk di Kabupaten Ende yang bekerja pada sektor pertanian secara umum masih berproduktivitas rendah. Hal ini antara lain terjadi karena tingkat pendidikan yang dimiliki pekerja di daerah ini rendah dan penerapan inovasi teknologi belum sesuai anjuran teknis, maka wajarlah jika sektor yang digeluti oleh pekerja di daerah ini lebih didominasi oleh sektor pertanian. Selain itu berdasarkan data curah hujan diperoleh bahwa jumlah curah hujan yang terjadi di Kabupaten Ende selama kurun waktu 2006-2008 relatif kecil dan bervariasi antara bulan yang satu dengan bulan yang

lainnya. Jumlah curah hujan dan banyaknya curah hujan lebih besar terjadi pada bulan Oktober sampai April. Wilayah – wilayah yang mendapat curah hujan dan hari hujan lebih tinggi adalah bagian tengah Kabupaten Ende, sedangkan wilayah bagian selatan dan utara Kabupaten Ende relatif lebih kecil. Hal ini berdampak pada potensi keunggulan di mana setiap wilayah berbeda.

Wilayah Kabupaten Ende dengan kondisi topografi yang berbukit-bukit dengan tingkat kemiringan di atas 45% menyebabkan biaya tinggi (*high cost*) pada sektor ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari mobilitas kendaraan pengangkut hasil produksi pertanian, disamping itu akses transportasi yang kurang memadai menyebabkan para petani membutuhkan waktu dan biaya yang relatif besar untuk menjual hasil komoditi pertanian. Permasalahan jaringan transportasi terletak pada langkanya sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan wilayah produksi dengan kota-kota terdekat. Kantong-kantong produksi pertanian umumnya berskala kecil dan tersebar dalam bentang wilayah yang luas, sehingga pengangkutan komoditas pertanian terpaksa dilakukan dalam volume yang relatif kecil yang mengakibatkan inefisiensi.

Tantangan yang akan dihadapi sektor pertanian di Kabupaten Ende adalah bagaimana mengubah orientasi (*reorientasi*) sistem usaha tani yang dilakukan masyarakat dari usaha tani yang berorientasi konsumsi keluarga (sub sistem) ke usahatani yang berorientasi pasar (agribisnis), atau dari usaha tani yang berorientasi budaya (lebih mementingkan kebutuhan adat istiadat) ke usaha tani yang berorientasi ekonomi produktif. Disamping itu, sebagai upaya penjabaran agenda Provinsi NTT, peningkatan konsumsi pangan lokal perlu didukung dengan peningkatan produksi bahan pangan lokal terutama jagung. Pengembangan sektor kehutanan dan perkebunan juga menjadi perhatian yang sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Ende, karena didukung oleh karakteristik wilayah dan kesesuaian lahan. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain: masih maraknya kegiatan penebangan liar (*illegal logging*), penggundulan hutan, serangan hama dan penyakit pada tanaman perkebunan (kelapa, kakao, jambu mete). Sektor kelautan dan perikanan pun menjadi andalan Kabupaten Ende, dimana didukung dengan potensi sumberdaya alam dengan luas perairan 4.568,632 km<sup>2</sup> dan pengembangan potensi sumberdaya perikanan budidaya laut seperti rumput laut. Namun demikian, pengembangan sektor ini dihadapkan dengan permasalahan antara lain: masih adanya kegiatan pemboman ikan (*illegal fishing*) yang menyebabkan kerusakan

ekosistem laut sehingga berdampak pada penurunan hasil tangkapan dan masih terbatasnya serta bersifat tradisional sarana penangkapan ikan yang dimiliki nelayan.

Pembangunan sektor industri diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ende melalui pemberdayaan industri rumah tangga berskala kecil dan menengah. Optimalisasi Industri rumah tangga menjadi usaha yang semakin efisien dan mampu berkembang mandiri guna meningkatkan perannya dalam penyediaan barang dan jasa serta berbagai komponen baik untuk pasar regional, nasional maupun luar negeri. Pembangunan industri kecil dan menengah termasuk industri kerajinan rumahtangga terus dibina agar menjadi usaha yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja. Sehubungan dengan itu dalam upaya pengembangan industri perlu memberikan kemudahan baik dalam permodalan, perijinan maupun pemasaran.

Untuk meningkatkan akses pemasaran produk, perlu adanya ketersediaan data-data perkembangan sektor ekonomi baik dalam bentuk data elektronik yang *on line* dan *off line* (leaflet, buklet, buku profil unggulan daerah) sehingga mempermudah para investor untuk menanamkan modalnya sesuai dengan komoditi unggulan daerah. Kondisi rill menunjukkan bahwa ketersediaan data yang dimiliki selama ini belum terpilah sesuai kebutuhan para pengguna data (*usser*).

Dalam pengembangan investasi dan penanaman modal terdapat beberapa hambatan antara lain: (1) Sarana dan prasarana pendukung penanaman modal dan investasi belum memadai, hal ini dapat dilihat dari terbatasnya ketersediaan infrastruktur baik prasarana darat, laut dan udara; (2) Kepemilikan lahan masih didominasi oleh tanah persekutuan adat sehingga mempersulit pemanfaatan lahan/tanah untuk pengembangan investasi; (3) Pengurusan administrasi izin penanaman modal dan investasi terkesan sangat birokratif dan membutuhkan waktu yang lama; (4) Masih kurangnya promosi terhadap potensi daerah dan peluang investasi kepada pihak investor baik melalui media cetak maupun elektronik ataupun kegiatan expose kerjasama dengan lembaga terkait baik berskala regional maupun nasional.

Permasalahan dan tantangan ke depan dalam sektor Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah bagaimana pemerintah dapat menyediakan sarana dan prasarana publik yang memadai, mendorong tumbuhkembangnya kewirausahaan pada

sektor koperasi dan UMKM yang ada dalam konteks mendukung Provinsi NTT dan kabupaten Ende sebagai provinsi dan kabupaten koperasi. Disamping itu perlu menyediakan akses yang seluas – luasnya bagi masyarakat dalam mendapatkan sumber permodalan yang mendukung koperasi dan UMKM.

Di sektor pariwisata, masalah utama yang dihadapi adalah belum dikelolanya secara baik obyek – obyek pariwisata yang ada di daerah ini. Obyek pariwisata yang sudah mulai di tata adalah obyek wisata danau Kelimutu, perkampungan adat Wolotopo dan Nggela serta Situs Bung Karno, sedangkan obyek – obyek wisata lainnya masih dalam taraf peninjauan pengembangannya. Untuk itu, upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dalam bidang pariwisata adalah mengembangkan sektor pariwisata secara terpadu, mempromosikan potensi Kabupaten Ende sebagai bagian dari pusat pengembangan pariwisata baru di Pulau Flores, serta mengembangkan taman rekreasi, hiburan yang lokasinya tersebar di wilayah Kabupaten Ende. Selain itu meningkatkan ketersediaan berbagai sarana dan prasarana penunjang seperti hotel, rumah makan, dan transportasi baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Disisi lain, beban pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun turut membawa dampak pada permasalahan ketenagakerjaan. Menurut data Badan Pusat Statistik, rumahtangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar daripada rumahtangga tidak miskin. Rumahtangga miskin di perkotaan rata-rata mempunyai anggota 5,1 orang, sedangkan rata-rata anggota rumahtangga miskin di pedesaan adalah 4,8 orang. Sementara pada tahun 2005 penduduk Kabupaten Ende berjumlah 247.742 jiwa dan meningkat pada tahun 2007 menjadi 250.652 jiwa, atau terjadi pertumbuhan sebesar 1.17 % dalam jangka waktu 2 tahun, dengan tingkat kepadatan sebesar 122 jiwa/km<sup>2</sup>.

Beban masyarakat terutama masyarakat miskin makin berat akibat besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Hal ini berakibat pada konsentrasi penduduk yang lebih banyak di daerah perkotaan dan potensi bertambahnya pengangguran karena peningkatan jumlah penduduk tidak seiring dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Ende pada Agustus 2007 mencapai 126.676 orang. Dari jumlah tersebut yang bekerja 123.725 orang, pengangguran terbuka sebanyak

2.951 orang. Jika dibedakan menurut daerah tempat tinggal, terlihat tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan (7.14%) hampir tujuh kali lipat dibandingkan dengan pedesaan sebesar 1,11%. Hal ini kemungkinan karena sektor pertanian merupakan sektor dominan di pedesaan dapat dikerjakan oleh setiap angkatan kerja di desa. Namun masalah kepemilikan tanah dimana sebagian besar petani kecil tidak secara formal menguasai lahan sebagai hak milik, dan walaupun mereka memiliki tanah, perlindungan terhadap hak mereka atas tanah tersebut tidak cukup kuat karena tanah tersebut seringkali tidak bersertifikat menjadi satu penyebab rendahnya penghasilan petani di desa. Keadaan ini sangat mungkin menyebabkan timbulnya niat dan minat untuk mencari lapangan pekerjaan di kota yang didominasi oleh sektor jasa dan perdagangan dengan upah yang diterima cukup tinggi. Akibatnya adalah pengangguran terbuka di daerah perkotaan menjadi lebih tinggi daripada pedesaan.

Rendah SDM tenaga kerja Indonesia juga merupakan satu penyebab tingginya angka pengangguran. Tenaga kerja Indonesia seringkali tidak mampu bersaing di pasaran tenaga kerja dunia, sehingga untuk memperbaiki perekonomian keluarga banyak TKI termasuk dari Kabupaten Ende yang menempuh jalur ilegal hanya untuk bekerja di luar negeri seperti Malaysia.

### **3.2. Penataan Ruang**

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2006 – 2020, mencakup perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang sebagai matra ruang pembangunan daerah untuk mewujudkan kebijakan struktur tata ruang dan pola pemanfaatan tata ruang.

Tinjauan khusus dilakukan terhadap struktur tata ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi: Pengembangan sistem kota-kota dan pusat permukiman; Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah, yang meliputi sistem jaringan transportasi; sumber dan jaringan distribusi tenaga listrik; sistem jaringan telekomunikasi; dan sistem prasarana sumberdaya air dan Pengembangan kawasan prioritas.

Tinjauan internal kebijakan pembangunan wilayah ditelaah terhadap kondisi dan kebijakan Kabupaten Ende yang bersifat spasial, yaitu RTRW Kabupaten Ende. Dalam RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wilayah Kabupaten Ende termasuk dalam kategori **Wilayah Pengembangan II** yaitu, dengan pengembangan komoditi unggulan

pertanian lahan basah, hortikultura, perkebunan, kelautan dan pariwisata serta pengembangan penunjang lahan kering, dan pertambangan;

Pengembangan struktur tata ruang wilayah Kabupaten Ende Tahun 1999 – 2009 didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ende nomor 5 Tahun 1999 diarahkan pada 3 Satuan Wilayah Pengembangan (SWP), yaitu Satuan Wilayah Pengembangan I sebagai kawasan budidaya seperti tanaman lahan kering, perkebunan, perindustrian, perikanan dan pariwisata, Satuan Wilayah Pengembangan II sebagai kawasan berfungsi lindung bagi daerah di bawahnya kawasan budidaya seperti perkebunan, hortikultura, hutan produksi dan pariwisata, dan Satuan Wilayah Pengembangan III sebagai kawasan budidaya seperti lahan basah dan lahan kering, perkebunan umur pendek, perikanan, pariwisata kawasan lindung setempat.

Dalam penentuan ketiga Wilayah Pembangunan (WP) tersebut, didasari oleh beberapa pertimbangan yang menjadi rujukan antara lain : Kondisi geografis wilayah, aksesibilitas terhadap pusat pelayanan, keterkaitan antar simpul pelayanan dengan wilayah pelayanannya, karakteristik potensi dan permasalahan, prioritas pengembangan.

Adapun tantangan yang berkaitan dengan penataan ruang di Kabupaten Ende adalah penataan ruang yang belum memperhatikan karakteristik dan potensi setiap wilayah dan belum sesuai dengan tataguna serta fungsi lahan di setiap wilayah. Selain itu pemanfaatan ruang yang ada telah terjadinya deviasi (penyimpangan tata ruang) yang seringkali membawa dampak pada menurunnya mutu lingkungan hidup, baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penunjang kehidupan sehari-hari.

### **3.3. Pendidikan**

Sektor pendidikan menjadi salah satu sektor penting dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Masalah pendidikan dapat dilihat melalui indikator angka melek huruf, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), angka putus sekolah, dan angka kelulusan.

Secara nasional, isu pendidikan dalam hubungan dengan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) adalah tingkat pendidikan penduduk Indonesia yang relatif masih rendah, mutu pendidikan yang relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik serta adanya kesenjangan tingkat pendidikan yang

cukup lebar antarkelompok masyarakat. Kesenjangan tingkat pendidikan dalam hal ini terjadi antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara penduduk perkotaan dan penduduk di pedesaan, dan antardaerah.

Data Susenas 2003 menunjukkan bahwa, penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/ belum pernah sekolah jumlahnya dua kali lipat penduduk laki-laki (11,56 persen berbanding 5,43 persen). Penduduk perempuan yang buta huruf sekitar 12,28 persen, sedangkan penduduk laki-laki yang buta huruf sekitar 5,84 persen. Melihat indikator APK, tampak bahwa partisipasi pendidikan kelompok penduduk miskin juga masih jauh lebih rendah dibandingkan penduduk kaya khususnya untuk jenjang SMP/ MTs ke atas. APK SMP/ MTs untuk kelompok termiskin baru mencapai 61,13 persen, sementara kelompok terkaya sudah hampir mencapai 100 persen. Untuk jenjang pendidikan menengah kesenjangan tampak sangat nyata dengan APK kelompok termiskin terbesar 23,17 persen dan APK kelompok terkaya sebesar 81,66 persen. Angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas juga menunjukkan perbedaan yang signifikan yaitu sebesar 4,01 persen untuk kelompok terkaya dan 16,9 persen untuk kelompok termiskin.

Sementara itu, analisis tingkat regional dan kabupaten juga menunjukkan bahwa masalah masih rendahnya tingkat dan mutu pendidikan masih menjadi masalah yang signifikan. Data angka melek huruf Kabupaten Ende sejak tahun 2004 – 2008 menunjukkan bahwa tetap 89,02%. Hal ini menunjukkan bahwa 10,98% penduduk usia diatas 15 tahun masih buta huruf. Partisipasi pendidikan tahun 2008 terlihat cenderung menurun pada tingkat lanjutan pertama dan menengah atas dimana APK tingkat SD/ MI, SMP/ MTs, SMA/ MA/ SMK masing-masing 134,17%; 69,56%; dan 62,99%. Sedangkan angka kelulusan pada tahun yang sama untuk tingkat SD/ MI (98,14%) dan SMK (85,83%) menunjukkan angka yang lebih tinggi dibanding angka kelulusan tingkat SMP/ MTs, SMA/ MA masing-masing 47,64% dan 61,79%.

Meskipun data-data tingkat pendidikan di Kabupaten Ende yang dikumpulkan belum memuat pemilahan data antara penduduk miskin dan kaya, namun pada kenyataannya nampak bahwa masalah kesenjangan pelayanan pendidikan juga masih terjadi di wilayah regional dan kabupaten yang salah satunya ditandai dengan masih sangat terbatasnya akses masyarakat yang bermukim di daerah terpencil terhadap fasilitas pendukung

pendidikan dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Sementara itu, kesenjangan tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan bangsa. Penduduk miskin yang umumnya berpendidikan rendah harus bekerja apa saja untuk mempertahankan hidupnya. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya posisi tawar masyarakat miskin dan tingginya kerentanan terhadap perlakuan yang merugikan. Kondisi ini lebih nyata terlihat pada pekerja perempuan dan anak. Dengan demikian, tingkat kemiskinan bukan berkurang bahkan sebaliknya proses pemiskinan akan terus berlanjut.

Faktor yang dicatat menjadi penyebab situasi diatas adalah masih relatif rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, beban tanggungan keluarga miskin yang besar yang menyabkan peluang anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan menjadi terhambat, kurangnya jumlah tenaga guru pada semua jenjang pendidikan dan guru yang bersertifikat sesuai yang diamanatkan dalam undang – undang no 14 tahun 2006 tentang guru dan dosen yang mengakibatkan rendahnya kapasitas guru dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan kurikulum, rendahnya partisipasi masyarakat yang ditunjukkan dengan masih kurang aktifnya komite sekolah dalam menunjang proses pendidikan, serta manajemen pendidikan belum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien terutama karena desentralisasi pendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik.

Kebijakan penuntasan WAJAR DIKDAS, UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan , serta beberapa produk hukum yang mengatur sertifikasi guru merupakan faktor kekuatan yang dapat dijadikan landasan upaya peningkatan mutu pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Bila ditinjau dari keberadaan berbagai perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Ende, maka hal mendasar yang perlu diarahkan untuk meningkatkan persentase kelulusan sejak tingkat pendidikan dasar dan menengah adalah dengan mengikutsertakan peran perguruan tinggi yang ada melalui program akselerasi peningkatan mutu guru dan dosen.

Desentralisasi pengelolaan pendidikan juga sebenarnya merupakan salah satu faktor kekuatan dimana daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pelayanan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah. Jika didukung oleh komitmen yang kuat dari para penentu kebijakan dan kemampuan SDM yang



berkualitas pengelola program pendidikan di tingkat daerah, maka desentralisasi dapat menjadikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian program di bidang pendidikan lebih efektif dan efisien.

Beasiswa dan kerjasama pendidikan antarlembaga, antardaerah maupun antarnegara dan peningkatan standar sekolah melalui akreditasi seharusnya dijadikan peluang besar untuk membantu peningkatan mutu pendidikan dan mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan terutama untuk penduduk miskin.

### **3.4. Kesehatan**

Pembangunan kesehatan di Indonesia harus diakui secara bertahap telah mengalami peningkatan. Data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan angka kematian bayi menurun dari 46 (SDKI 1997) menjadi 35 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2002-2003) dan angka kematian ibu melahirkan menurun dari 334 (SDKI 1997) menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2002-2003). Umur harapan hidup meningkat dari 65,8 tahun (Susenas 1999) menjadi 66,2 tahun (Susenas 2003). Menurut Survey Konsumsi Garam Yodium yang juga mencakup survei status gizi, prevalensi gizi kurang (*underweight*) pada anak balita, telah menurun dari 34,4 persen (1999) menjadi 25,8 persen (2002).

Di tingkat provinsi, derajat kesehatan di Nusa Tenggara Timur juga telah mengalami peningkatan, hal itu ditandai dari menurunnya angka kematian Bayi (AKB) dari 53/1000 (th 2002) menjadi 50/1000 (tahun 2005). dan angka kematian ibu melahirkan (AKI) dari 554/100.000 (tahun 2002) menjadi 540/100.000 (tahun 2005). Prevalensi Gizi Kurang menunjukkan angka 26 %.

Meskipun telah banyak kemajuan di bidang pembangunan kesehatan, namun angka kematian ibu dan bayi, angka gizi kurang dan gizi buruk, masih tetap menjadi isu kesehatan baik di tingkat nasional, regional maupun kabupaten. Disamping itu, disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-pedesaan yang masih cukup tinggi, beban ganda berkembangnya pola penyakit infeksi menular dan peningkatan penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes mellitus dan kanker, serta *emerging diseases* seperti demam berdarah dengue (DBD), HIV/AIDS juga menjadi isu yang harus mendapat perhatian serius.

Secara nasional disparitas status kesehatan ditandai dengan angka kematian bayi dan angka kematian balita pada golongan termiskin hampir empat kali lebih tinggi dari golongan terkaya. Angka nasional menunjukkan kematian bayi pada kelompok termiskin adalah 61 per 1000 kelahiran hidup, jauh lebih tinggi daripada golongan terkaya sebesar 17 per 1000 kelahiran hidup. Selain itu, angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan lebih tinggi di daerah pedesaan, di kawasan timur Indonesia, serta pada penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Persentase anak balita yang berstatus gizi kurang dan buruk di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan.

Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi serta angka gizi buruk di Kabupaten Ende tidak dapat dilepaskan dari permasalahan kinerja pelayanan kesehatan yang masih rendah; masih kurangnya jumlah, kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan; terbatasnya jumlah tenaga kesehatan dan kurang meratanya distribusi tenaga kesehatan; perilaku masyarakat yang tidak sehat; serta kondisi lingkungan yang belum memadai yang tercermin antara lain dari akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi dasar.

Ditinjau dari aspek ketenagaan, rasio tenaga kesehatan terutama tenaga dokter (dokter ahli, dokter umum, dokter gigi), bidan dan perawat dibanding jumlah penduduk masih sangat terbatas. Sementara, dari sisi penyediaan sarana pelayanan kesehatan, Kabupaten Ende telah cukup mempunyai cukup sarana pelayanan kesehatan baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan dan desa namun masih perlu didukung dengan peningkatan kuantitas dan kualitas peralatan dan fasilitas penunjang. Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang menajmin pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, masyarakat di daerah perbatasan dan masyarakat di daerah terpencil, terisolir (secara fisik, sosial, dan ekonomi) dan daerah sangat terpencil juga masih perlu ditingkatkan.

Disamping itu, belum optimalnya kerjasama lintas sektor, pendayagunaan tenaga dalam manajemen pelayanan kesehatan, sistim informasi kesehatan, sistem perencanaan dan penganggaran kesehatan, sistem pengendalian, pembinaan dan pengembangan perencanaan, penelitian dan pengembangan, dan pengembangan pemberdayaan masyarakat dan sumberdaya kesehatan merupakan tantangan yang perlu diupayakan pemecahannya.

Dari sisi masyarakat, kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat yang tidak sehat perlu mendapat penanganan yang lebih komprehensif di tingkat kabupaten. Ketersediaan sarana sanitasi dasar menjadi wajib dalam kerangka pengentasan kemiskinan. Kenyataan masih menunjukkan bahwa belum semua rumah tangga di Kabupaten Ende menggunakan air bersih, dan baru kurang lebih setengah dari seluruh keluarga yang ada memiliki jamban keluarga.

Adapun kendala di tingkat masyarakat yang dijumpai adalah tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, pembiasaan perilaku masyarakat yang tidak sehat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan, hambatan finansial terutama masyarakat miskin akibat besarnya tanggungan keluarga.

Tantangan lain dalam pembangunan kesehatan yang tidak boleh diabaikan adalah isu gender dan ancaman bencana. Isu gender dalam pelayanan kesehatan sangat berkaitan dengan hambatan budaya dan adat dimana budaya patriarki mengakibatkan perempuan berada pada posisi tawar yang lemah, sehingga seringkali perempuan kurang memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan sementara suara perempuan dalam memperjuangkan kebutuhannya seringkali terkendala. Sementara itu, ancaman bencana menjadi sangat kuat untuk wilayah NTT pada umumnya dan Kabupaten Ende pada khususnya karena iklim yang mendukung terjadinya kejadian luar biasa serta posisi geologis yang rawan terhadap berbagai bencana.

Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan kesehatan, berbagai peluang yang ada dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan upaya peningkatan derajat kesehatan diantaranya adanya penerapan desentralisasi kesehatan yang memberi kesempatan kepada daerah untuk mengelola bidang kesehatan sesuai dengan kebutuhan, adanya tim pengembangan penelitian yang ada di 3 regional, *research* CDC di 3 Kabupaten yang dibina oleh Balitbangkes Departemen Kesehatan dan Tim Kajian Teknis untuk membantu kejian teknis masalah kesehatan wilayah, serta adanya kerjasama dengan lembaga swasta, LSM, NGO lokal, nasional dan internasional.

Di tingkat masyarakat, upaya pembangunan kesehatan perlu dilakukan secara lebih komprehensif dan cost-effective. Identifikasi sumber daya dan kekuatan-kekuatan lokal perlu dilakukan dan digunakan sebagai landasan pengembangan program. Ketersediaan

pegawai yang memadai, adanya standar operasional prosedur dan peraturan-peraturan tingkat nasional dalam bidang kesehatan merupakan beberapa kekuatan yang dapat dipergunakan sebagai modal pembangunan kesehatan di daerah. Berbagai program pemberdayaan masyarakat yang telah banyak dilaksanakan dalam mendukung pembangunan di bidang kesehatan selama ini juga merupakan aset yang perlu terus ditingkatkan jumlah dan mutunya. Penegasan berbagai kebijakan bidang kesehatan dalam bentuk peraturan yang lebih mengikat juga sangat membantu dalam pengembangan upaya-upaya kesehatan.

### **3.5. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kondisi birokrasi saat ini dihiasi oleh gambaran tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, pelanggaran disiplin, rendahnya kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai, tidak adanya kepastian waktu, tidak transparan, dan kurang responsif terhadap permasalahan yang berkembang di daerahnya.

Dalam hal kapasitas keuangan daerah, masalah yang dijumpai antara lain terbatasnya efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah, belum efisiennya prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional, serta terbatasnya kemampuan pengelolaannya termasuk dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta profesionalisme.

Kemungkinan penyebab dari seluruh situasi diatas adalah struktur organisasi pemerintah daerah yang umumnya masih besar dan saling tumpang tindih, prasarana dan sarana pemerintahan masih minim dan pelaksanaan standar pelayanan minimum belum mantap. Juga hubungan kerja antar lembaga, termasuk antara pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan organisasi non pemerintah masih

perlu ditingkatkan. Pengawasan terhadap kinerja aparatur negara, rendahnya kesejahteraan PNS, dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan juga ditengarai menjadi penyebab tambahan rendahnya kualitas pelayanan umum oleh birokrat.

Selain itu, belum terbangunnya sistem dan regulasi yang memadai di dalam perekrutan dan pola karir aparatur pemerintah daerah menyebabkan rendahnya sumberdaya manusia berkualitas menjadi aparatur pemerintah daerah. Hal lainnya yang menjadi masalah adalah masih kurangnya etika kepemimpinan di beberapa daerah.

Di tengah makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik; meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum; meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan; dan tantangan globalisasi dan revolusi teknologi informasi (*e-Government*), upaya penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa wajib dilaksanakan dengan lebih serius. Reformasi birokrasi melalui perampingan struktur organisasi, pembangunan sistem dan regulasi yang memadai di dalam perekrutan dan pola karir aparatur pemerintah daerah dengan mengutamakan profesionalisme dan kompeten, pemenuhan prasarana dan sarana pemerintahan, pelaksanaan standar pelayanan minimum yang mantap serta peningkatan etika kepemimpinan merupakan strategi yang perlu dijalankan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Demikian pula, upaya kerjasama antar daerah untuk penanganan masalah bersama dan pemberian kewenangan yang lebih kepada desa untuk mengembangkan kebijakan lokal sehingga peran aktif masyarakat dalam pembangunan lebih besar perlu lebih ditingkatkan. Otonomi daerah perlu dipahami sebagai pelimpahan wewenang yang perlu dilakukan dengan inovasi-inovasi untuk mengelola kabupaten Ende sesuai potensi yang dimiliki.

### **3.6. Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang bersifat dasar dan pokok serta merupakan salah satu pilar yang menyangga negara hukum. Pemenuhan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan agar warga negara dapat hidup sesuai dengan kemanusiaannya. Hak asasi manusia melingkupi antara lain hak atas kebebasan

berpendapat, hak atas kecukupan pangan, hak atas rasa aman, hak atas penghidupan dan pekerjaan, hak atas hidup yang sehat serta hak-hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

Pada kenyataannya, permasalahan hukum dan HAM masih banyak terjadi di banyak daerah. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kelompok atau golongan, kurang berfungsinya institusi-institusi negara yang berwenang dan wajib menegakkan HAM, penegakan hukum yang tidak adil, tidak tegas, dan diskriminatif masih menjadi fenomena yang sering di beritakan dalam media cetak dan elektronik.

Faktor penyebab yang mungkin berpengaruh terhadap masih rendahnya penegakan hukum dan HAM antara lain adalah karena alasan prosedural hukum, politik birokrasi, tidak adanya kemauan baik, aksi saling lempar tanggungjawab, penegakan hukum dan kepastian hukum masih melihat status sosial seseorang, pelaksanaan putusan pengadilan yang seringkali hanya memihak pada pihak yang kuat dan penguasa, serta tidak adanya keteladanan dari pimpinan. Situasi demikian pada akhirnya membawa dampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan menjadi sangat potensial sebagai pemicu timbulnya konflik di masyarakat.

Untuk menjawab permasalahan diatas, Pemerintah perlu secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia dengan proses yang lebih transparan dan melibatkan tidak saja instansi/lembaga pemerintah tetapi juga berbagai organisasi non pemerintah dan organisasi lainnya. Demikian pula penguatan kualitas institusi penegak hukum dan teladan kepemimpinan sangat diperlukan terutama di era otonomi daerah dimana kewenangan daerah menjadi lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan.

### **3.7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Masalah utama dalam pembangunan pemberdayaan perempuan adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Di samping itu, kesejahteraan dan perlindungan anak pun belum secara optimal.

Budaya patriarki mempunyai pengaruh yang besar terhadap masalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan. Budaya patriarki mengakibatkan perempuan berada pada posisi tawar yang lemah. Pengambilan keputusan yang hirarkis juga telah meminggirkan

perempuan secara sistematis dalam beberapa kebijakan, program dan lembaga yang tidak responsif gender. Situasi ini ditandai oleh kurangnya jumlah perempuan yang duduk dalam lembaga pemerintah dan politik, kematian ibu dan bayi yang disebabkan oleh keterlambatan pengambilan keputusan untuk merujuk, juga rendahnya Angka Partisipasi Kasar anak perempuan untuk sekolah tingkat lanjutan pertama dan menengah atas.

Meningkatnya perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*), masih banyaknya jumlah wanita rawan sosial dan anak terlantar menunjukkan bahwa kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak masih jauh dari yang diharapkan. Ironisnya, peraturan perundang-undangan yang ada juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak, termasuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Faktor penyebab yang memberi kontribusi terhadap permasalahan diatas antara lain masalah kelembagaan dan jaringan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota), yang belum jelad terutama yang menangani masalah-masalah pemberdayaan perempuan dan anak dan belum tersedianya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, sehingga sulit dalam menemukenali masalah-masalah gender yang ada. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Untuk meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka pemenuhan komitmen internasional (seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women*, *Beijing Platform for Action*, *Convention on the Rights of the Child*, dan *World Fit for Children*) perlu lebih diperkuat dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada harus dilakukan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak. Demikian pula ketersediaan data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin akan sangat membantu perencanaan pembangunan yang responsif gender.

#### **BAB IV. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN ENDE TAHUN 2005-2025**

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025 dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, dan dengan memperhatikan gambaran umum daerah dan analisis isu-isu strategis Kabupaten Ende, maka Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Ende periode 2005-2025 adalah :

***“Terwujudnya Masyarakat Ende yang Mandiri, Maju, Adil, Sejahtera, Demokratis dan Berdaya Saing dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”***

Visi pembangunan Kabupaten Ende tahun 2005–2025 bermuara pada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa dipengaruhi orang lain, sejajar dengan daerah lain yang telah maju, dengan ditopang peningkatan ekonomi serta memiliki kecukupan pangan, sandang dan papan untuk dinikmati seluruh rakyat kabupaten Ende serta mempunyai kedudukan yang sama dalam bidang politik dan hukum.

Kemandirian akan dicapai dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok.

Profil SDM yang berkualitas ditandai dengan tingginya tingkat pendidikan masyarakat, semakin tingginya derajat kesehatan masyarakat serta meningkatnya pendapatan per kapita penduduk. SDM berkualitas juga ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk, yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; termasuk derajat kesehatan dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.

Kemandirian dan kemajuan tidak hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas dalam kelembagaan, pranata-pranata serta nilai-nilai yang mendasari kehidupan demokrasi, sosial dan politik.

Keadilan dan kemakmuran harus tercermin dalam semua aspek kehidupan, dimana seluruh rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik serta mendapatkan



perlindungan dan kesamaan kedudukan di depan hukum, dengan tetap memperhatikan keunggulan kompetitif yang ditunjang dengan sumber daya manusia yang berkualitas.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan, ditempuh melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan Kabupaten Ende sebagai berikut:

1. **Mewujudkan masyarakat Ende yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila**, yang dilaksanakan melalui agenda antara lain:
  - 1.1 Meningkatkan kualitas manusia yang berbudi-pekerti luhur
  - 1.2 Memperkokoh ketahanan dan pelestarian budaya daerah yang ditandai semakin meningkatnya peradaban, harkat dan martabat masyarakat Ende, serta menguatnya jati diri dan kepribadiannya.
  - 1.3 Mempertahankan keberadaan dan keragaman budaya baik dalam bentuk nilai dan norma maupun dalam perilaku, sifat religiusitas, serta mampu menerima, menghargai dan mengelola keragaman sebagai kekuatan persatuan dan kesatuan baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.
  - 1.4 Meningkatkan etos kerja yang bermoral baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.
2. **Mewujudkan masyarakat Ende yang mandiri, maju, berkualitas dan berdaya saing**, yang dilaksanakan melalui agenda antara lain:
  - 2.1 Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
  - 2.2 Meningkatkan mutu, relevansi dan keunggulan pendidikan yang berbasis kompetensi dan teknologi informasi pada semua jenis dan jenjang pendidikan yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai
  - 2.3 Meningkatkan jumlah dan mutu tenaga pendidik dan kesehatan
  - 2.4 Meningkatkan peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan menuju kemandirian.
  - 2.5 Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
  - 2.6 Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesadaran masyarakat dalam berkeluarga berencana.
  - 2.7 Meningkatkan jaringan interaksi, interelasi dan interkoneksi ekonomi menuju kemandirian untuk memperkuat daya saing daerah.

- 2.8 Meningkatkan peran Kabupaten Ende dalam lingkup regional, nasional dan internasional
3. **Mewujudkan masyarakat Ende yang demokratis berlandaskan hukum**, yang dilaksanakan dengan agenda antara lain :
- 3.1 Membangun masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum melalui proses karakterisasi dan institusionalisasi dalam segala lingkup baik secara kelembagaan maupun secara individu sebagai warga masyarakat.
  - 3.2 Memantapkan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah.
  - 3.3 Meningkatkan kebebasan pers yang bertanggungjawab.
  - 3.4 Meningkatkan kualitas aparatur melalui peningkatan kompetensi, kinerja, etos kerja, reformasi struktur birokrasi yang efektif dan efisien guna mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.
4. **Mewujudkan Ende sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan**, yang dilakukan melalui agenda antara lain :
- 4.1 Mempertahankan dan meningkatkan pengolahan dan pengelolaan semua modal pembangunan yang meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan sumber daya buatan
  - 4.2 Mempertahankan kemandirian pangan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan sepanjang tahun untuk tingkat rumah tangga
  - 4.3 Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan potensi daerah yang spesifik dengan menitikberatkan pada sektor pertanian dalam arti luas dan pariwisata yang didukung sarana prasarana yang memadai
  - 4.4 Revitalisasi pertanian melalui pembangunan pertanian spesifik wilayah yang sesuai dengan potensi lokal dan kelautan Kabupaten Ende serta aspek sosial budayanya.
  - 4.5 Mendorong terjadinya perubahan perilaku ekonomi melalui upaya-upaya pergeseran perilaku konsumtif menuju perilaku ekonomis produktif
  - 4.6 Meningkatkan kualitas dan produktivitas angkatan kerja dan penciptaan kesempatan kerja
  - 4.7 Meningkatkan ketersediaan dan kemudahan untuk mendapatkan penguatan modal masyarakat miskin dan pedesaan
  - 4.8 Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan daerah

5. **Mewujudkan Ende sebagai kabupaten yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan**, dapat dilakukan melalui agenda :
  - 5.1 Menciptakan kondisi lingkungan yang sehat, kondusif dan dinamis
  - 5.2 Meningkatkan kemajuan, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan yang berkelanjutan, merata, serasi dan lestari.
  - 5.3 Mencegah dan merehabilitasi kerusakan sumber daya air, alam dan lingkungan.
  
6. **Meningkatkan Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS)** yang dilaksanakan dengan agenda antara lain :
  - 6.1 Meningkatkan kemampuan dan kapasitas IPTEKS untuk mendukung ketahanan pangan dan energi; penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; penyediaan teknologi transportasi, dan teknologi kesehatan dan berbagai bidang lainnya.
  - 6.2 Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi yang ada di daerah melalui pengembangan sumber daya manusia, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan IPTEKS lintas sektor, perumusan agenda riset yang selaras dengan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi untuk menjamin aksesibilitas, kualitas dan akuntabilitas.
  
7. **Menciptakan Efisiensi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Kokoh**, yang dilaksanakan dengan agenda antara lain:
  - 7.1 Mengintegrasikan pembangunan sektor primer, sekunder dan tersier demi efisiensi dan pertumbuhan ekonomi yang kokoh.
  - 7.2 Memperkuat kapasitas perekonomian lokal guna mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing melalui perbaikan inefisiensi ekonomi, pengurangan ketimpangan ekonomi dan instabilitas pertumbuhan ekonomi.

## **BAB V. ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 – 2025**

Dalam upaya mencapai Visi Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Ende yang Mandiri, Maju, Adil, Sejahtera, Demokratis dan Berdaya Saing dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende 2005-2025 membutuhkan tahapan dan prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam setiap tahapan pembangunan jangka menengah, terdapat prioritas yang berkesinambungan dari periode ke periode untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Indikator tercapainya masyarakat Ende yang maju, mandiri, adil dan sejahtera dalam pembangunan daerah 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

1. **Terwujudnya Masyarakat Ende yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan Falsafah Pancasila** yang ditandai dengan :
  - 1.1. Meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat masyarakat Ende, serta menguatnya jati diri dan kepribadiannya.
  - 1.2. Terbentuknya masyarakat yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, dan berkembang dinamis
  - 1.3. Terbentuknya masyarakat yang religius dan mempunyai sikap dan perilaku menghargai kearifan budaya lokal
  - 1.4. Meningkatnya etos kerja bermoral dalam konteks kelembagaan dan kemasyarakatan
  
2. **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Ende yang mandiri, maju, berkualitas dan berdaya saing**, yang ditandai dengan:
  - 7.3 Meningkatnya akses pelayanan pendidikan serta pelayanan kesehatan terutama untuk kaum perempuan, masyarakat terisolir dan kelompok masyarakat kurang mampu.
  - 7.4 Meningkatnya mutu pendidikan formal maupun non formal yang berbasis kompetensi dan teknologi informasi yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai
  - 7.5 Meningkatnya jumlah dan mutu tenaga pendidik dan kesehatan
  - 7.6 Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan.

- 7.7 Meningkatnya kemitraan antara Pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- 7.8 Meningkatnya kualitas manajemen layanan kesehatan dan keluarga berencana yang dititikberatkan pada upaya preventive dan promotif,
- 7.9 Meningkatnya promosi identitas daerah sebagai Kabupaten demokratis dalam tatanan masyarakat regional, nasional dan internasional.

**3. Terwujudnya Masyarakat Ende yang demokratis, berlandaskan hukum** yang ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- 3.1. Terciptanya peraturan perundang-undangan untuk memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan.
- 3.2. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.
- 3.3. Meningkatnya peran pers, masyarakat sipil dan partai politik dalam penguatan demokrasi.
- 3.4. Terciptanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang professional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian nasional.

**4. Terwujudnya Ende sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan** yang ditandai dengan:

- 4.1. Meningkatnya pengolahan dan pengelolaan semua modal pembangunan yang meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan sumber daya buatan
- 4.2. Adanya kemandirian pangan yang dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan sepanjang tahun untuk tingkat rumah tangga.
- 4.3. Berkembangnya ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan potensi daerah yang spesifik yang menitikberatkan pada sektor pertanian dalam arti luas dan pariwisata yang didukung sarana prasarana yang memadai sehingga menghasilkan komoditi berkualitas.

- 4.4. Terlaksananya revitalisasi pertanian melalui pembangunan pertanian spesifik wilayah yang sesuai dengan potensi lokal dan kelautan Kabupaten Ende serta aspek sosial budayanya.
  - 4.5. Terjadinya perubahan perilaku ekonomi melalui upaya-upaya pergeseran perilaku konsumtif menuju perilaku ekonomis produktif
  - 4.6. Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan daerah
- 5. Terwujudnya Ende sebagai kabupaten yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan, yang ditandai dengan:**
- 5.1. Meningkatnya eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam, air, laut, hasil hutan, dan lahan kritis dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan.
  - 5.2. Adanya rehabilitasi terhadap kerusakan sumber daya air, alam dan lingkungan.
- 6. Meningkatnya Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang ditandai dengan:**
- 6.1. Meningkatnya Penguasaan IPTEKS baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi; penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; penyediaan teknologi transportasi, dan teknologi kesehatan serta berbagai teknologi bidang lainnya.
  - 6.2. Terlaksananya kerjasama di bidang penelitian dan pengkajian dengan lembaga penelitian dari perguruan tinggi yang ada di daerah, untuk melaksanakan pengkajian dan pengembangan untuk kesejahteraan yang seluas-luasnya bagi masyarakat.
- 7. Menciptakan Efisiensi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Kokoh yang ditandai dengan:**
- 7.1. Terintegrasinya sektor-sektor perekonomian baik primer, sekunder dan tersier sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
  - 7.2. Menguatnya kapasitas perekonomian lokal guna mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing melalui perbaikan inefisiensi ekonomi, pengurangan ketimpangan ekonomi dan instabilitas pertumbuhan ekonomi.

## **5.1. Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025**

### **5.1.1. Mewujudkan Masyarakat Ende Yang Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya dan Beradab berdasarkan Falsafah Pancasila.**

Terciptanya kondisi masyarakat Ende yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Di samping itu, kesadaran akan budaya daerah memberikan arah bagi perwujudan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

- a) Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Di samping itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.
- b) Pembangunan dan pemantapan jati diri masyarakat Ende ditujukan untuk mewujudkan karakter dan sistem sosial yang berakar, unik, modern, dan unggul. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antara nilai luhur bangsa, seperti religius, kebersamaan dan persatuan, serta nilai modern yang universal yang mencakup etos kerja dan prinsip tata pemerintahan yang baik.

### **5.1.2. Mewujudnya Masyarakat Kabupaten Ende yang mandiri, maju, berkualitas dan berdaya saing untuk mencapai Kesejahteraan.**

Untuk mencapai masyarakat Kabupaten Ende yang maju, mandiri, adil, sejahtera dan berdaya saing, kebijakan pembangunan diarahkan pada:

- a) Pengembangan pelayanan pendidikan yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing global disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi daerah pada masa depan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, profesionalisme dan kesejahteraan guru, manajemen yang berkualitas dan pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat serta dunia.

- b) Pengembangan pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta sebagai aset pemerintah dan masyarakat Kabupaten Ende untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas baik secara akademik maupun non akademik.
- c) Pengembangan pelayanan kesehatan terutama dalam peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan dengan berdasarkan pada asas pemerataan, keterjangkauan, perikemanusiaan, kemandirian, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut (manula), dan keluarga miskin.
- d) Peningkatan upaya preventif dan promotif di bidang kesehatan dengan menitikberatkan pada pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat bagi setiap warga masyarakat.
- e) Peningkatan kualitas pelayanan program Keluarga Berencana dalam rangka pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang didukung oleh sistem administrasi kependudukan yang efektif untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, regional dan nasional serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.
- f) Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, kesejahteraan dan perlindungan anak, penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak termasuk ketersediaan data dan statistik gender.
- g) Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan (*nation building*) dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan
- h) Reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di daerah agar mampu mendukung pembangunan di bidang-bidang lainnya
- a) Peningkatan kesempatan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan dan peraturan, kesempatan untuk memperoleh akses pada modal usaha dan sumber daya alam dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif yang mendatangkan kemakmuran.
- b) Peningkatan kerja sama dengan daerah lain dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif Kabupaten Ende, menghilangkan



ego daerah yang berlebihan, serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik.

- c) Meningkatkan promosi identitas daerah sebagai Kabupaten demokratis dalam tatanan masyarakat regional, nasional dan internasional.

### **5.1.3. Mewujudkan Masyarakat Ende yang demokratis, berlandaskan hukum**

Untuk mewujudkan masyarakat Ende yang demokratis berlandaskan hukum, kebijakan pembangunan diarahkan pada:

- a) Penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi yang berkelanjutan.
- b) Penataan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan pejabat publik
- c) Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, menghargai perbedaan, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media
- d) Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik dengan jaringan teknologi informasi dan komunikasi kebebasan pers yang lebih mapan, terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan negara secara cerdas dan demokratis.
- e) Pembaruan perundang-undangan daerah dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang makin tertib dan teratur.
- f) Penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia dilaksanakan secara tegas, lugas, profesional, dan tidak diskriminatif dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), keadilan, dan kebenaran, terutama dalam penyelidikan, penyidikan, dan persidangan yang transparan dan terbuka dalam rangka mewujudkan tertib sosial dan disiplin sosial sehingga mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas daerah yang mantap dan dinamis.

- g) Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur negara penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur pemerintah dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat, lini pemerintahan, dan semua kegiatan
- h) Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik

#### **5.1.4. Mewujudkan Ende sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan**

Kebijakan pembangunan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan diarahkan pada:

- a) Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memerhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan laut serta memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan
- b) Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi.
- c) Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.
- d) Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan melalui perluasan dan diversifikasi aktivitas ekonomi dan perdagangan (nonpertanian) di pedesaan yang terkait dengan pasar di perkotaan yang didukung oleh infrastruktur transportasi yang memadai
- e) Pembangunan perdesaan didorong melalui pengembangan agroindustri yang berbasis pertanian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya;
- f) Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan kemampuan produksi daerah yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga

yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

- g) Koperasi yang didorong berkembang luas sesuai kebutuhan menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya, baik produsen maupun konsumen di berbagai sektor kegiatan ekonomi sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
- h) Pembangunan kesejahteraan sosial dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung (miskin, fakir, usia lanjut, penderita cacat, terlantar) dan masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, serta wilayah rawan bencana.
- i) Keterpaduan pembangunan pertahanan, pembangunan keamanan dalam negeri, dan pembangunan keamanan sosial yang diselenggarakan berdasarkan kondisi geografi, demografi, sosial, dan budaya.
- j) Terciptanya sistem keamanan dan ketertiban yang bertumpu pada profesionalisme aparaturnya beserta institusi terkait serta melibatkan seluruh komponen masyarakat

#### **5.1.5. Mewujudkan Ende sebagai kabupaten yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan**

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan daerah dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Kondisi lingkungan yang tertata rapi, indah, sehat, memberikan suasana nyaman bagi masyarakat dan menarik bagi wisatawan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Untuk mewujudkan Ende sebagai kabupaten yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan, kebijakan pembangunan diarahkan pada:

- a) Pemanfaatan secara optimal potensi tambang Kabupaten Ende untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengupayakan berbagai tindakan pengamanan untuk menjamin keberlanjutannya dalam jangka panjang
- b) Pemenuhan ketersediaan sumber air yang cukup untuk kebutuhan konsumsi dan produksi masyarakat serta perlindungan dan rehabilitasi sumber air yang mengalami pengrusakan.

- c) Konservasi dan rehabilitasi lahan di sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk menjamin pasokan air serta pengembangan daerah aliran sungai dan menjaga daerah tangkapan air (*catchment area*)
- d) Pencegahan bertambahnya lahan kritis dari upaya-upaya pengrusakan lingkungan dan rehabilitasi fungsi lahan-lahan kritis yang sudah rusak
- e) Pelestarian, rehabilitasi dan perluasan hutan untuk konservasi dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- f) Meningkatkan teknologi dan management pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan sesuai rencana tata ruang dan wilayah daerah untuk menjamin upaya perlindungan hutan.
- g) Pengelolaan dan pendayagunaan potensi perikanan dan sumber daya laut, pesisir secara lestari berbasis masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang modern
- h) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan pencegahan dan pemulihan lahan kritis pelestarian sumberdaya air dan mengembangkan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan sumber daya air.
- i) Meningkatkan keterlibatan masyarakat, kemitraan dan kerjasama dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan potensi perikanan dan sumber daya laut, pesisir.
- j) Menjaga keamanan wilayah laut sebagai suatu teritori multifungsi dan menjaga sumberdaya laut sebagai kekayaan lestari dari segala gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar.
- k) Pemanfaatan sumber daya alam terbarukan, baik di darat dan di laut secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang.
- l) Pemulihan sumber daya alam terbarukan beserta daya dukungnya sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pembangunan yang berkelanjutan.
- m) Pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral, dan sumber daya energi diarahkan untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlakukan sebagai masukan untuk proses produksi yang dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal bagi daerah.
- n) Pengembangan sumber-sumber energi alternatif dengan memperhatikan kelestarian aalam dan lingkungan.

- o) Pengembangan pemetaan daerah-daerah rawan bencana dan penerapan sistem deteksi dini serta sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat.

#### **5.1.6. Meningkatkan Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS)**

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri dan untuk mengabdikan kepada kemanusiaan dan dipergunakan bagi kesejahteraan manusia. Pembangunan ilmu pengetahuan di berbagai bidang keilmuan selain untuk menghasilkan SDM berkualitas dan profesional, juga untuk memperkuat daya saing masyarakat dan bangsa melalui peningkatan jumlah paten/hak cipta hasil kajian penelitian dan pengembangan, ekspor teknologi tinggi (manufaktur) untuk meningkatkan besaran kontribusi IPTEKS dan SDM terhadap dunia usaha.

Kebijakan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan pada:

- a) Peningkatan, penguasaan, dan penerapan IPTEKS secara luas di berbagai bidang keilmuan dalam rangka mendukung daya saing secara global.
- b) Pengembangan sarana dan prasarana IPTEKS, standar mutu, kuantitas dan kualitas lembaga penelitian yang handal
- c) Perwujudan sistem pengakuan terhadap hasil penemuan dan hak atas kekayaan intelektual,
- d) Pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi IPTEKS dengan mengarahkan masyarakat dari budaya konsumtif menuju budaya produktif.

#### **5.1.7. Menciptakan Efisiensi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Kokoh**

Dalam upaya menciptakan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan pembangunan diarahkan pada:

- a) Pengembangan perekonomian berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memerhatikan kepentingan daerah dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik untuk menciptakan kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, dan terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar

- b) Penguatan struktur perekonomian dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.
- c) Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah pertanian dalam arti luas dan kelautan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan mengembangkan agribisnis yang dinamis dan efisien, yang melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan
- d) Peningkatan iklim investasi yang menarik sehingga mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.
- e) Pelaksanaan perdagangan luar negeri yang dilakukan masyarakat Ende diupayakan lebih menguntungkan dan mendukung perekonomian nasional dan daerah
- f) Peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.
- g) Perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. Dalam rangka meningkatkan kemandirian, peran pinjaman luar negeri dijaga pada tingkat yang aman.
- h) Peningkatan kemampuan, kompetensi dan perlindungan tenaga kerja terutama tenaga kerja yang berkerja di luar negeri sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi
- i) Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja.
- j) Kerjasama antar daerah dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar daerah yang kokoh.
- k) Mengembangkan industri kelautan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral, bangunan laut, dan jasa kelautan.

## 5.2. Tahapan dan Skala Prioritas

### 5.2.1. RPJM Ke - 1 Tahun 2005 – 2009

Berbagai strategi dan agenda pembangunan selama kurun waktu 2005-2009 yang dituangkan dalam dokumen RPJMD yang kemudian diakumulasi dalam "CATUR PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN ENDE", telah ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi. Hasil evaluasi mengindikasikan adanya capaian-capaian kinerja selama periode 2005-2009 yang diharapkan dapat dilanjutkan pada periode berikutnya. Hasil evaluasi menunjukkan adanya berbagai keberhasilan dan kegagalan, hal mana berbagai keberhasilan patut untuk dipertahankan dan kegagalan patut untuk diperbaiki pada periode berikutnya.

Gambaran strategi pembangunan yang kemudian dijabarkan dalam tiga Agenda Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2005-2009, selanjutnya dituangkan dalam CATUR PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN ENDE yaitu " Ekonomi rakyat, Pendidikan rakyat, Kesehatan rakyat, dan Keamanan dan Ketertiban rakyat sebagai berikut :

1. Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.  
Agenda ini melingkupi 3 (tiga) dari Catur Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Ende yaitu Ekonomi Rakyat, Pendidikan Rakyat dan Kesehatan Rakyat, ditambah program-program penunjang.
2. Agenda Mewujudkan Masyarakat yang Adil, Setara dan Berbudaya.  
Agenda ini melingkupi Catur Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Ende yang keempat, yaitu : Hukum dan Ketertiban Rakyat, ditambah program-program penunjang
3. Agenda Pengembangan Otonomi Daerah yang Mandiri dan Percepatan Pembangunan Demokrasi di Daerah.  
Agenda ini melingkupi program-program penunjang dari Catur Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Ende.

Agenda Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2005-2009 :

1. Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat  
Sasaran dan Prioritas Pembangunannya :
  - a. Sasaran menurunnya jumlah penduduk miskin dan pembukaan lapangan kerja.
  - b. Sasaran meningkatkan pembangunan wilayah dan masyarakat pedesaan.

- c. Sasaran meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Agenda Mewujudkan Masyarakat yang Adil, Setara dan Berbudaya.  
Sasaran dan Prioritas Pembangunannya :
    - a. Sasaran meningkatkan rasa aman dan damai yang tercermin dari menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok/golongan masyarakat dan menurunnya angka kriminalitas secara nyata di perkotaan dan perdesaan.
    - b. Sasaran meningkatnya keadilan dan penegakan hukum.
    - c. Sasaran meningkatnya keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan.
    - d. Sasaran terpeliharanya budaya lokal yang tercermin dari semakin kuatnya pengaruh adat istiadat/tradisi budaya yang bernilai tinggi.
    - e. Sasaran mendorong percepatan pencegahan dan penanggulangan korupsi.
  3. Agenda Pengembangan Otonomi Daerah yang Mandiri dan Percepatan Pembangunan Demokrasi di Daerah.  
Sasaran dan Prioritas Pembangunannya :
    - a. Sasaran meningkatnya penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan daerah yang menjamin kesejahteraan masyarakat serta tata pemerintahan yang baik.
    - b. Sasaran meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat.
    - c. Sasaran mengkokohkan kemandirian keuangan daerah dalam upaya peningkatan kemampuan desentralisasi fiskal daerah.
    - d. Sasaran terlaksananya pemilihan kepala daerah secara demokratis dengan berlandas pada asas umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil dengan tetap menjaga keberlangsungan konsolidasi demokrasi dan pelembagaan nilai-nilai demokrasi.

Indikator capaian kinerja selama kurun waktu 2004-2009 adalah sebagai berikut berikut :

- IPM mencapai angka 65,39.
- Usia Harapan Hidup 64,2.
- Persentase Buta Huruf 10,98%
- Rata-rata Lama Sekolah 6,6
- Angka Kematian Bayi 44/1000 Kelahiran Hidup
- Persentase penduduk miskin 22%



### **5.2.2. RPJM Ke - 2 Tahun 2009 – 2014**

Diharapkan pada tahapan RPJMD kedua dapat menindaklanjuti apa yang telah dicapai pada tahapan pertama. Wujud masyarakat Kabupaten Ende yang diharapkan adalah kondisi masyarakat yang sejahtera lahiriah maupun batiniah yang hidup dalam lingkungan yang sehat, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tetap mempertahankan budaya lokal untuk menunjang pembangunan, namun tetap menghargai kemejemukan.

Untuk mencapai kondisi sumberdaya manusia Kabupaten Ende yang handal harus didukung oleh moral, etika, budaya dan adab berdasarkan nilai-nilai Pancasila, ditandai dengan peningkatan profesionalisme dan moral aparatur untuk memberikan layanan publik yang lebih murah, cepat, transparan dan akuntabel agar kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ende terus menerus meningkat berdasarkan indikator pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran; meningkatnya pendidikan masyarakat dan mutu pendidikan, relevansi pendidikan serta daya saing lulusan; meningkatnya derajat kesehatan dan perbaikan status gizi; peningkatan peran perempuan dan perlindungan anak.

Untuk mengukur manusia Ende yang berkualitas dan berdaya saing global, ditandai dengan meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat; meningkatnya mutu, relevansi dan keunggulan pada semua jenis dan jenjang pendidikan; meningkatnya manajemen pembangunan sumberdaya manusia secara transparan dan akuntabel; meningkatnya pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan pendidikan dan layanan kesehatan.

Untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Ende yang demokratis berlandaskan hukum dan pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat ditentukan dengan stabilitas wilayah yang aman dan damai; pelaksanaan Pilkada berjalan demokratis dan damai; penegakan supremasi hukum, penurunan konflik politik dan daerah, penguatan peran masyarakat sipil dan kelembagaan keagamaan serta kelembagaan politik.

Untuk mewujudkan Ende sebagai wilayah yang bertahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan didukung oleh pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat, ditandai dengan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan dan sumberdaya lainnya secara terencana dan terkoordinasi serta berkelanjutan; pembukaan daerah-daerah teriso-lasi dan terpencil; peningkatan jaringan infrastruktur transportasi; meningkatnya promosi wisata budaya, bahari dan alam serta menumbuhkembangkan jiwa wirausaha pada masyarakat Kabupaten Ende; meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik rakyat; dan terciptanya stabilitas politik, ekonomi dan keamanan di daerah.

Untuk mewujudkan Ende sebagai wilayah keseimbangan lingkungan membutuhkan rehabilitasi, konservasi dan pengendalian kawasan hutan – lahan kritis; pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam, merehabilitasi dan perbaikan daerah/kawasan sumberdaya alam yang telah dirusak oleh aktivitas manusia dan akibat alam untuk menjamin terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan; Sumberdaya air dan DAS; Akses air bersih dan tata kelola pemukiman yang baik dan meningkatnya lingkungan sosial yang tertib, nyaman dan damai; meningkatnya pengembangan IPTEKS yang ramah lingkungan serta redistribusi domisili baru.

Dengan harapan akan mencapai target kinerja rencana pembangunan dalam kurun waktu ini sebagai berikut :

- IPM mencapai angka 68,3.
- Usia Harapan Hidup 65,5
- Angka Buta Aksara diharapkan menjadi 7%
- Angka Kematian Bayi 11/ 1000 Kelahiran Hidup
- Kasus Kematian Ibu menurun menjadi 5 kasus
- Kemiskinan 20,33%
- Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,5%
- Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat
- Tata kelola pemerintahan yang baik dan penegakan hukum dan HAM.
- Pembangunan yang responsif gender.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan.

### 5.2.3. RPJM Ke- 3 Tahun 2014 – 2019

Kemajuan masyarakat Kabupaten Ende ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing global antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran; meningkatnya pendidikan masyarakat dan mutu pendidikan, relevansi pendidikan serta daya saing lulusan; meningkatnya derajat kesehatan dan perbaikan status gizi; peningkatan peran perempuan dan perlindungan anak.

Diharapkan wilayah Kabupaten Ende memiliki ketahanan ekonomi, sosial, politik dan keamanan didukung oleh pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat yang didukung dengan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan dan sumberdaya lainnya secara terencana dan terkoordinasi serta berkelanjutan; pembukaan daerah – daerah terisolasi dan terpencil; meningkatnya pengembangan IPTEKS yang ramah lingkungan; peningkatan jaringan infrastruktur transportasi; meningkatnya promosi wisata budaya, bahari dan alam melalui jaringan teknologi informatika.

Untuk mengoptimalkan potensi dibidang kelautan dan perikanan, maka perlu didukung dengan proses penyadaran masyarakat tentang Gerakan Masuk laut (Gemala) secara terus menerus; peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan; peningkatan produksi dan jaringan pemasaran; peningkatan sumberdaya manusia nelayan, perlindungan dan pengawasan habitat laut; termasuk pengembangan budi daya rumput laut. Kebijakan fiskal daerah berdasarkan luas darat dan laut; regulasi perikanan dan kelautan yang berpihak pada daerah dan masyarakat; dan pengembangan industri kelautan berbasis masyarakat dan meningkatkan peran sekolah kejuruan berdasarkan klasifikasi dan spesifik daerah kepulauan dalam menanggulangi kemiskinan.

Dengan harapan akan mencapai target kinerja rencana pembangunan dalam kurun waktu ini sebagai berikut :

- IPM mencapai angka 73,3.
- Buta aksara 5%
- Angka Kematian Bayi 5/ 1000 Kelahiran Hidup
- Kasus Kematian Ibu menurun menjadi 3 kasus
- Kemiskinan 15%
- Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,6%.

- Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat
- Tata kelola pemerintahan yang baik dan penegakan hukum dan HAM
- Pembangunan yang responsif gender
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan.

#### **5.2.4. RPJM Ke- 4 Tahun 2019 – 2024**

Pada periode RPJM tahun ke tiga ini, maka titik berat pembangunan diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Ende sebagai wilayah keseimbangan lingkungan (ekosistem) untuk itu diperlukan upaya rehabilitasi, konservasi dan pengendalian kawasan hutan – lahan kritis; pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam, merehabilitasi dan perbaikan daerah/kawasan sumberdaya alam yang telah dirusak oleh aktivitas manusia dan akibat alam untuk menjamin terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan; Sumberdaya air dan DAS; Akses air bersih dan tata kelola pemukiman yang baik.

Disamping itu perhatian tetap diarahkan pada peningkatan ekonomi rakyat melalui pola pengembangan wilayah terpadu; peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan dan kesehatan untuk seluruh wilayah Kabupaten Ende. Upaya-upaya tersebut perlu didukung dengan komitmen yang tinggi dari setiap pelaku pembangunan dengan tetap mengikutsertakan masyarakat sebagai subyek pembangunan.

Target kinerja rencana pembangunan dalam kurun waktu ini sebagai berikut :

- IPM mencapai angka 80
- Angka partisipasi kasar SD/MI 130, SMP/MTs 85 dan SMA/MA 80.
- Angka Kematian Bayi 3/ 1000 Kelahiran Hidup
- Kasus Kematian Ibu menurun menjadi 3 kasus
- Kemiskinan 12%
- Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,8%.
- Pendapatan perkapita masyarakat Ende Rp. 12.000.000,-
- Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat.
- Tata kelola pemerintahan yang baik dan penegakan hukum dan HAM
- Pembangunan yang responsif gender
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan.

## **BAB VI. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

### **6.1. Pedoman Transisi**

Masa berlaku RPJP Daerah Kabupaten Ende adalah tahun 2005 - 2025. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diamanatkan bahwa untuk menghindari kekosongan perencanaan maka RPJPD yang ada pada periode Pemerintahan sebelumnya untuk sementara dapat digunakan.

### **6.2. Kaidah Pelaksanaan**

#### **6.2.1. Pola Penyelenggaraan**

- 1) Program Indikatif pada tahun 2005-2025 ditetapkan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan
- 2) RPJPD akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun RPJMD Kabupaten Ende
- 3) Sasaran RPJPD Kabupaten Ende dijabarkan dalam RPJMD dan dikendalikan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Ende pada setiap tahapan RPJMD.

#### **6.2.2. Organisasi Pelaksana**

Penyelenggaraan RPJPD Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 dilakukan berdasarkan jenjang hirarki struktur organisasi dan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Ende, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat DPRD, Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis dan lembaga lain Kabupaten Ende sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tentang Organisasi Perangkat Daerah maupun antisipasi terhadap revisi Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah di atas.

#### **8.2.3. Pengendalian dan Evaluasi**

##### **a. Pengendalian**

Pengendalian RPJPD Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 dilaksanakan melalui mekanisme:

- Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah di lingkup kabupaten yang meliputi pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah oleh Kepala SKPD untuk program dan/ atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pengendalian oleh bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- Pemantauan pelaksanaan program dan/ atau kegiatan oleh SKPD meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi. Hasil pemantauan program dan/ atau kegiatan disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda. Kepala bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada kepala daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

#### **b. Evaluasi**

Evaluasi RPJPD Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 dilaksanakan melalui mekanisme:

- Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah ingkup kabupaten, yang meliputi evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan hasil rencana pembangunan daerah.
- Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- Evaluasi oleh Bappeda meliputi penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.
- Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evauasi pelaksanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

Evaluasi umum pelaksanaan RPJPD dilaksanakan pada setiap akhir pentahapan RPJMD, dan dibuat sebagai evaluasi resmi kinerja Pemerintah Kabupaten. RPJPD

Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 harus dijalankan secara bertanggungjawab, yang dilandasi dengan moral dan dedikasi tinggi, dalam mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Ende.

**BUPATI ENDE,**

**Drs. DON BOSCO M. WANGGE, M.Si**

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende, 2005, ***Ende Dalam Angka 2004***, Ende.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende, 2006, ***Ende Dalam Angka 2005***, Ende.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2005, ***SE Mendagri No. 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah***, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 1958, ***Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur***, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 1958, ***Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur***, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2003, ***Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara***, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2003, ***Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan***, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004, ***Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional***, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004, ***Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah***, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004, ***Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah***, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, ***Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional***, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2007, ***Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang***, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2007, ***Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)***, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2007, ***Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025***, Jakarta.



- Pemerintah Republik Indonesia, 2006, ***Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan***, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2006, ***Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional***, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2006, ***Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah***, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2007, ***Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2008, ***Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintahan Otonomi Daerah***, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2008, ***Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah***, Jakarta.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2004, ***Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Daerah Provinsi NTT 2004-2008***, Kupang.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2004, ***Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Provinsi NTT 2004 – 2008***, Kupang.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2005, ***Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT Tahun 2006 – 2020***, Kupang.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2008, ***Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005 – 2025***, Kupang.



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE  
NOMOR 3 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN ENDE TAHUN 2005 -2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ENDE,**

- Menimbang : a. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan tidak dibuatnya lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional;
- b. bahwa Kabupaten Ende merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan daerah secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005 – 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE  
dan  
BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2005 – 2025

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ende .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende
3. Bupati adalah Bupati Ende..
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ende .
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun..
11. Visi adalah rumusan umum tentang arah yang akan dituju melalui upaya yang akan dilaksanakan pada akhir periode perencanaan pada tahun 2025.
12. Misi adalah rumusan kebijakan umum sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya visi daerah.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.

**BAB II**  
**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) Rincian dari Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 4

- (3) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun Rencana RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

**BAB III**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJP Daerah
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di: Ende  
pada tanggal : 8 Agustus 2009

**BUPATI ENDE,**

**DON BOSCO M.WANGGE**

Diundangkan di Ende  
pada tanggal                      2009

**PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,**

**BERNADUS GURU**  
LEMBARAN DAERAH TAHUN KABUPATEN ENDE NOMOR        SERI

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 3 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**  
**KABUPATEN ENDE TAHUN 2005-2025**

**I. UMUM**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten Ende tahun 2005-2025 adalah: (a) sebagai arah dan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik Pemerintah, masyarakat, dan stakeholders, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai koridor dalam penyusunan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Program Kepala Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah; (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah. Mengingat RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah, Pemerintah Kabupaten menyiapkan rancangan RPJP Daerah yang disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda).

RPJP Daerah Kabupaten Ende sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Ende (pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha) dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. RPJPD Kabupaten Ende bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, transparan,



partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, maju, dan sejahtera dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dan menjadi pedoman didalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Ende.

RPJPD Kabupaten Ende memuat visi yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Ende yang Mandiri, Maju, Adil, Sejahtera, Demokratis dan Berdaya Saing dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”** dengan harapan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Ende dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan tersebut, ditempuh melalui 7 (tujuh) Misi yaitu: mewujudkan masyarakat Ende yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; mewujudkan masyarakat Ende yang mandiri, maju, berkualitas dan berdaya saing; mewujudkan masyarakat Ende yang demokratis berlandaskan hukum; mewujudkan Ende sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan; mewujudkan Ende sebagai kabupaten yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan; meningkatkan Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS); dan menciptakan Efisiensi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Kokoh.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1: Cukup Jelas

Pasal 2: Cukup Jelas

Pasal 3: Cukup jelas

Pasal 4: Cukup jelas

Pasal 5: Cukup Jelas

Pasal 6: Cukup Jelas

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Pengantar	1
1.2. Pengertian	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Landasan Hukum	3
1.5. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	4
1.6. Pendekatan dan Sistematika	7
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH</b>	<b>8</b>
2.1. Kondisi Saat Ini	8
2.1.1. Letak Geografis	8
2.1.2. Topografi	8
2.1.3. Geologi	9
2.1.4. Flora dan Fauna.	9
2.1.5. Klimatologi	10
2.2. Kependudukan, Angkatan Kerja dan Keluarga Berencana	10
2.2.1. Jumlah Penduduk	10
2.2.2. Kepadatan dan Distribusi Penduduk	10
2.2.3. Komposisi Penduduk	11
2.2.4. Laju Pertumbuhan Penduduk	11
2.2.5. Angkatan Kerja	12
2.2.6. Keluarga Berencana	12
2.3. Sosial, Politik dan Keamanan	13
2.3.1. Kondisi Sosial	13
2.3.2. Kondisi Politik dan Keamanan	13
2.4. Pendidikan	14
2.5. Kesehatan	18
2.6. Kondisi Perekonomian	22
2.6.1. Struktur Ekonomi	22
2.6.2. Pertumbuhan Ekonomi	23
2.6.3. PDRB dan Pendapatan Per Kapita	24
2.7. Pembangunan Sektor – Sektor Produksi	24
2.7.1. Pertanian	24
2.7.2. Peternakan	26
2.7.3. Kelautan dan Perikanan	27
2.7.4. Perkebunan.	28

2.7.5. Kehutanan	30
2.7.6. Pariwisata	30
2.7.7. Industri dan Perdagangan	31
2.7.8. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	33
2.7.9. Pertambangan dan Energi	33
<b>2.8. Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Daerah</b>	<b>34</b>
2.8.1. Transportasi Laut	34
2.8.2. Perhubungan Udara	35
2.8.3. Transportasi Darat dan Prasarana Jalan dan Jembatan	35
2.8.4. Prasarana Irigasi	36
2.8.5. Penataan Ruang	37
2.8.6. Perumahan	37
<b>2.9. Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>38</b>
<b>2.10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>38</b>
<b>2.11. Penanggulangan Bencana</b>	<b>39</b>
<b>BAB III. ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS</b>	<b>40</b>
<b>3.1. Ekonomi</b>	<b>40</b>
<b>3.2. Penataan Ruang</b>	<b>45</b>
<b>3.3. Pendidikan</b>	<b>46</b>
<b>3.4. Kesehatan</b>	<b>49</b>
<b>3.5. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</b>	<b>52</b>
<b>3.6. Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia</b>	<b>53</b>
<b>3.7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>54</b>
<b>BAB IV. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN ENDE TAHUN 2005-2025</b>	<b>56</b>
<b>BAB V. ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 – 2025</b>	<b>60</b>
<b>5.1. Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025</b>	<b>63</b>
5.1.1. Mewujudkan Masyarakat Ende Yang Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya dan Beradab berdasarkan Falsafah Pancasila.	63
5.1.2. Mewujudnya Masyarakat Kabupaten Ende yang mandiri, maju, berkualitas dan berdaya saing untuk mencapai Kesejahteraan.	63
5.1.3. Mewujudkan Masyarakat Ende yang demokratis, berlandaskan hukum	65
5.1.4. Mewujudkan Ende sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan	66
5.1.5. Mewujudkan Ende sebagai kabupaten yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan	67
5.1.6. Meningkatkan Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS)	69
5.1.7. Menciptakan Efisiensi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Kokoh	69

<b>5.2. Tahapan dan Skala Prioritas</b>	<b>71</b>
5.2.1. RPJM Ke - 1 Tahun 2005 – 2009	71
5.2.2. RPJM Ke - 2 Tahun 2009 – 2014	73
5.2.3. RPJM Ke- 3 Tahun 2014 – 2019	75
5.2.4. RPJM Ke- 4 Tahun 2019 – 2024	76
<b>BAB VI. PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN</b>	<b>77</b>
<b>6.1. Pedoman Transisi</b>	<b>77</b>
<b>6.2. Kaidah Pelaksanaan</b>	<b>77</b>
6.2.1. Pola Penyelenggaraan	77
6.2.2. Organisasi Pelaksana	77
6.2.3. Pengendalian dan Evaluasi	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>80</b>

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

<i>Tabel 2-1: Penduduk Berumur 15 tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja di Kab. Ende Th. 2001-2003</i>	12
<i>Table 2-2: Persentase APS SD/MI Kabupaten Ende Tahun 2004-2005</i>	15
<i>Tabel 2-3: Persentase APS SMP/MTs Kabupaten Ende Tahun 2004-2005</i>	15
<i>Tabel 2-4: Persentase APS SMA/MA Kabupaten Ende Tahun 2004-2005</i>	15
<i>Tabel 2-5: Persentase APS SMK/MAK Kabupaten Ende Tahun 2004-2005</i>	16
<i>Tabel 2-6: Jumlah Sekolah, Guru dan Peserta Didik di Kabupaten Ende Tahun 2002-2004</i>	16
<i>Tabel 2-7: Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Ende Tahun 2004</i>	18
<i>Table 2-8: Data Tenaga Kesehatan (Dokter Umum, Perawat dan Bidan) di Kabupaten Ende Tahun 2004-2005.</i>	20
<i>Tabel 2-9: Data Sarana Kesehatan di Kabupaten Ende Tahun 2004-2005.</i>	21
<i>Tabel 2-10: Perkembangan PDRB Per Sektor Lapangan Usaha Kabupaten Ende Tahun 2003 dan 2005</i>	22
<i>Tabel 2-11: Produktivitas Padi, Jagung, Ubi, Kacang dan Shorgum di Kab. Ende Tahun 2004-2005</i>	25
<i>Tabel 2-12: Data Produksi Perikanan Kabupaten Ende Tahun 2004 - 2005</i>	27
<i>Tabel 2-13: Luas Areal Tanaman Komoditi Perkebunan Tahun 2005</i>	28
<i>Tabel 2-14: Produksi Komoditi Perkebunan Tahun 2005.</i>	29
<i>Tabel 2-15: Data Industri Kerajinan Rumah Tangga di Kabupaten Ende Tahun 2004-2005</i>	31
<i>Tabel 2-16: Data Industri Kecil per Jenis Kerajinannya di Kabupaten Ende Tahun 2004 – 2005</i>	32
<i>Tabel 2-17: Data Arus Bongkar Muat dan Kunjungan Kapal Di Pelabuhan Ippi Kab. Ende Tahun 2002 – 2004.</i>	35
<i>Tabel 2-18: Data arus Penumpang di Bandara H.H Aroebusman Ende Tahun 2002-2004</i>	35
<i>Gambar 1-1: Keterkaitan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah .....</i>	5